

PROSEDUR PEMBIAYAAN DAN PENANGANAN MASALAH PADA KJKS BMT ARAFAH SUKOHARJO



Tugas Akhir

Disusun untuk Melengkapi Tugas – Tugas dan Memenuhi Syarat –Syarat

Mencapai Gelar Ahli Madya Jurusan Keuangan dan Perbankan

Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh :

YUSUF AZIZ RAHMA

F 3 6 0 7 1 0 3

**PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2010

HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas Akhir dengan judul :

PROSEDUR PEMBIAYAAN DAN PENANGANAN MASALAH PADA KJKS BMT ARAFAH SUKOHARJO

Surakarta,JUNI 2010

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Izza Matruhah, SE, M.Si

NIP. 197203232002122001

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir dengan judul:

PROSEDUR PEMBIAYAAN DAN PENANGANAN MASALAH PADA KJKS BMT ARAFAH SUKOHARJO

telah disahkan oleh Tim Penguji Tugas Akhir
Jurusan Diploma III Keuangan dan Perbankan
Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta,JULI 2010

Tim Penguji Tugas Akhir:

Linggar Ikhsan Nugroho, SE
NRP. 360800001

Izza Mafruhah, SE, M.Si
NIP. 197203232002122601



Penguji



Pembimbing

MOTTO

“ Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman “ (Al Baqrah : 278)

“ Jumpailah manusia dengan baik, sehingga jika engkau mati mereka menangisimu, jika engkau hidup mereka merindukanmu “ (Ali bin Abi Tholib r. a.)

“ Ilmu itu diambil dari nafas, bukan hidup dalam sebuah buku “ (Syaiikh Hamzah Yusuf)

“ Barang siapa yang mengandalkan kebenaran hanya dari orang lain, maka dia akan tersesat ditempat yang membingungkan. Oleh karena itu hendaklah engkau sendiri yang memahami kebenaran, maka engkau akan memahami orang-orang “ (Imam Abu Hamid Al Ghazali)

*“ Jika bumi ini dibelah, niscaya hanya akan engkau dapatkan kata syukur dan sabar “
(Ulama' Masyhur)*

“ To give is basically to invest “ (Ekonom Muslim)

*“ Tak ada ilmu yang tak bisa ditakhlukkan, karena yang ada hanya ketidakmauan “
(Sahabat Muslim)*

PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini dipersembahkan untuk:

- 1. Allah 'Azza Wajalla yang masih menggerakkan detak jantungku, dan memberi nafas bagi tubuhku.*
- 2. Kedua Orang Tuaku, dengan sepenuh jiwa dan ragamu aku bisa bertahan sampai sekarang.*
- 3. Kedua adikku, senyum dan tangismu membuatku semakin kuat untuk menjalani hidup.*
- 4. Semua kru KJKS BMT Arafah, karena kalian aku lebih mengerti makna ilmu ekonomi sesungguhnya.*
- 5. Semua orang yang aku cintai karena Allah Ta'ala, yang membuatku tersenyum dan menangis.*

KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Segala puji hanya milik Allah *Ta'ala* yang memberikan kemudahan diatas kesulitan, yang memberikan kekuatan ketika diri ini mulai lelah, dan yang memotivasi untuk senantiasa memberikan yang terbaik untuk umat.

Dengan mengucapkan Alhamdulillah penulis akhirnya mampu menyelesaikan tugas Laporan Magang Kerja yang selama ini menjadi keharusan, walaupun dalam hal ini jauh dari kata sempurna, akan tetapi ini adalah hasil usaha keras untuk menuju proses pencapaian penyelesaian tugas akhir nanti.

Sangat penulis sadari, bahwa dalam penyusunan laporan ini penulis sangat terbantu dari beberapa pihak. Maka dengan kerendahan hati, penulis sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Bambang Setiaji selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Prof. DR. Bambang Sutopo, M.Com., Ak. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Nurul Istiqomah SE.,M.Si, selaku Ketua Prodi Diploma III Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Ibu Izza Mafruhah, SE., M.Si. Selaku dosen pembimbing, yang telah membantu dan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan berbagai arahan yang berguna sehingga laporan kerja magang ini dapat terselesaikan.

5. Bapak Drs. Sutomo, MS. Selaku Pembimbing Akademik.
6. Bapak Ibu dosen serta seluruh staf karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu dan pelayanan yang baik selama penulis melangkahkan kaki di perguruan tinggi ini.
7. Teman-teman IPM, PM, Badko TPQ, FPM, yang telah mempercayaku dan mengajarku tentang arti organisasi.
8. Sahabat dan teman-teman Fakultas Ekonomi Diploma 3 Keuangan Perbankan 2007.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik dari penulisan maupun penyajian, untuk itu segala kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga tugas laporan Magang Kerja ini menjadi awal kesuksesan penulis pada langkah selanjutnya. Amin.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Surakarta, April 2010

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	I
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penulisan.....	5
D. Manfaat Penulisan.....	5
E. Batasan Masalah.....	6
F. Metode Penulisan	7
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Ekonomi Islam	9

	B. Lembaga Keuangan Syariah.....	14
	C. <i>Baitul Maal wat Tamwil</i> (BMT).....	20
BAB III	PEMBAHASAN	
	A. Gambaran Umum KJKS BMT Arafah	40
	1. Sejarah Singkat Perkembangan KJKS BMT Arafah	40
	2. Visi dan Misi KJKS BMT Arafah	41
	3. Produk KJKS BMT Arafah	42
	4. Struktur Organisasi KJKS BMT Arafah	52
	5. Diskripsi Jabatan KJKS BMT Arafah	53
	B. Prosedur Pembiayaan KJKS BMT Arafah	59
	1. Permohonan Pembiayaan	61
	2. Analisis Pembiayaan.....	64
	3. Analisa Jaminan	67
	4. Administrasi Jaminan Pembiayaan	71
	5. Realisasi Pembiayaan	73
	C. Tahapan Penanganan Pembiayaan Bermasalah.....	77
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	85
	B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perbedaan sistem konvensional dengan syariah.....	12
Tabel 2.2	Perbedaan sistem bunga dan bagi hasil	14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Struktur Organisasi KJKS BMT Arafah	52
Gambar 3.2	Prosedur Pembiayaan	60
Gambar 3.3	Prosedur Penanganan Pembiayaan Bermasalah.....	79

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Formulir Magang Kerja
Lampiran 2	Surat Keterangan
Lampiran 3	Surat Pernyataan
Lampiran 4	Form Pembiayaan
Lampiran 5	Foto Aktivitas Magang Kerja

ABSTRAK

PROSEDUR PEMBIAYAAN DAN PENANGANAN MASALAH PADA KJKS BMT ARAFAH

YUSUF AZIZ RAHMA

F 3 6 0 7 1 0 3

Pertumbuhan ekonomi dalam pembangunannya tidak lepas dari sektor lembaga keuangan. Dengan adanya lembaga keuangan, masyarakat yang kekurangan dana baik yang bersifat produktif maupun konsumtif dapat teratasi. Namun yang menjadi masalah yaitu minimnya masyarakat yang mengetahui prosedur pembiayaan dalam suatu lembaga keuangan, khususnya dalam hal ini adalah BMT. Sehingga terkadang masyarakat mengurungkan niat pergi ke lembaga keuangan untuk melakukan permohonan pembiayaan bukan karena ketidaktahuan masyarakat tentang lembaga keuangan, melainkan ketidaktahuan masyarakat akan prosedur pembiayaan itu sendiri, yang dianggap berbelit-belit dan butuh proses panjang. Dan dari pada itu, kecemasan terjadinya pembiayaan bermasalah yang efeknya akan berdampak besar bagi kelangsungan hidupnya. Hal ini menjadi permasalahan baru bagi masyarakat pada umumnya. Sehingga dalam hal ini perlu adanya pelaksanaan khusus terkait prosedur pembiayaan dan penanganan masalah pada lembaga keuangan khususnya KJKS BMT Arafah.

Tujuan penelitian Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui prosedur apa saja yang dilakukan KJKS BMT Arafah dalam memberikan pembiayaan. Selain itu juga untuk mengetahui prosedur penanganan masalah pada pembiayaan yang diberikan. Ruang lingkup penelitian ini mencakup diskripsi umum profil KJKS BMT Arafah dan prosedur pembiayaan serta penanganan masalah. Kemudian, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara langsung dengan pengurus KJKS BMT Arafah dan observasi dengan mengamati langsung kegiatan bagian pembiayaan dalam proses pembiayaan. Metode pembahasan yang digunakan oleh peneliti adalah model pembahasan *Diskriptif* yaitu pembahasan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai suatu obyek yang di teliti.

Penelitian ini akan dibahas khusus bagaimana prosedur pembiayaan dan penanganan masalah pada KJKS BMT Arafah. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pembiayaan dan penanganan masalah sehingga pihak yang kekurangan dana lebih mudah mengakses lembaga keuangan khususnya BMT Arafah. BMT Arafah belum dapat menerapkan prosedur yang dianggap mudah oleh pihak kekurangan dana. Dan sebagai saran, hendaknya BMT Arafah mempermudah prosedur pembiayaan dan penanganan masalah tanpa harus keluar dari prinsip syar'i.

Kata Kunci: Prosedur pembiayaan, Penanganan masalah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi dalam pembangunannya tidak bisa lepas dari peran serta sektor lembaga keuangan. Lembaga keuangan yang pada prinsipnya merupakan lembaga intermediasi, merupakan lembaga yang menghimpun dana pihak-pihak *surplus* atau kelebihan dana dan menyalurkannya kembali kepada pihak-pihak yang *defisit* atau membutuhkan dana. Telah lama lembaga keuangan baik bank maupun non bank didominasi oleh sistem bunga, walaupun masih banyak Negara yang mengalami kemakmuran dengan menggunakan sistem bunga ini, akan tetapi lebih banyak Negara yang belum bisa mencapai kemakmuran dengan sistem ini. Apalagi Negara berkembang seperti Negara Indonesia. Justru dengan kejadian harus di *likuidasi* nya beberapa lembaga keuangan khususnya bank, yang terjadi kurang dari 12 tahun terakhir ini harusnya menjadi pelajaran penting bagi para ekonom khususnya untuk terpacu mencari sistem yang lain yang dianggap lebih selamat.

Dengan keluarnya Undang-Undang No. 10 tahun 1998 yang merupakan revisi dari peraturan pemerintah No. 72 tahun 1992 tentang sebuah bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil, maka seiring dengan hal tersebut banyak pula lembaga keuangan non bank yang muncul dengan sistem bagi hasil. Salah satunya adalah BMT (*Baitul Mal Wa Tamwil*), yang

merupakan lembaga keuangan mikro yang menginduk pada koperasi, sehingga BMT lebih *familier* dengan koperasi jasa keuangan syariah. Peraturan dan pelaksanaan kegiatannya diatur dalam Keputusan Menteri Negara koperasi dan usaha kecil menengah RI nomor : 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah.

Keberadaan BMT ini merupakan salah satu dari lembaga keuangan non bank untuk mewujudkan keinginan khususnya sebagian umat islam tentang jasa layanan yang berprinsip syariah dalam mengelola perekonomiannya. Walaupun kurang lebih telah 12 tahun yang lalu peraturan tentang bank dengan prinsip bagi hasil disyahkan, tetapi untuk BMT yang menginduk pada koperasi baru disyahkan tahun 2004 lalu, sehingga praktek lembaga keuangan syariah non bank khususnya BMT masih relatif baru dikalangan masyarakat. Namun sebelum disyahrkannya peraturan tentang koperasi berprinsip bagi hasil, sebagian umat islam telah berhasil memulai lebih awal untuk mengembangkan BMT, sehingga lebih kurang dari 2000 BMT sekarang telah tersebar di seluruh Indonesia.

Dalam masa krisis ekonomi yang melanda Negara Indonesia beberapa waktu lalu, masyarakat kelas menengah kebawah semakin jauh terperosok dalam jurang kemiskinan. Namun sebagian masyarakat yang mempunyai usaha kecil dan menengah justru mampu bertahan jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang besar justru gulung tikar. Hal ini menunjukkan bahwa pengusaha kecil dan menengah mempunyai potensi yang sangat besar

untuk mengembangkan kembali usahanya. Namun disisi lain, kemampuan yang dimiliki oleh pengusaha kecil dan menengah tidak sebanding lurus dengan ketersediaan modal yang dimilikinya. Padahal jika pengusaha kecil dan menengah mempunyai tambahan *financial*, maka kemungkinan besar usaha yang dikelola tersebut akan lebih cepat berkembang. Sehingga melihat dari pada konteks ini, sudah dapat disimpulkan bahwa tidak hanya kemiskinan saja yang menuntut seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, akan tetapi pengusaha kelas kecil dan menengah pun membutuhkan dana segar untuk kelangsungan usahanya.

BMT dengan prinsip syariah atau lebih *familier* disebut dengan bagi hasil, lahir untuk menjawab permasalahan-permasalahan riil yang dialami oleh umat Islam khususnya. Dengan pemikirannya, BMT berkeinginan untuk memberikan pembiayaan tanpa jaminan. Namun seiring berjalannya waktu, untuk pembiayaan yang harus dijamin, maka BMT pun menerapkan jaminan. Hal ini sebagai sarana *win-win solution* untuk kedua belah pihak.

Bagi dunia perekonomian dan pengusaha kecil dan menengah, serta masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan masalah keterbatasan *financial* selalu dirasakan sebagai kendala utama yang dikeluhkan. Dengan keterbatasan *financial* itu sendiri diharapkan adanya akses dari masyarakat kepada BMT untuk memberikan pembiayaan-pembiayaan yang jumlahnya relatif terjangkau, syarat-syarat yang lebih mudah, dan prosedur yang tidak berbelit-belit namun tetap menerapkan prinsip syariahnya. Hal ini sesuai dengan sifat kebutuhan masyarakat yang mudah, cepat, serta terjangkau.

Mudah dan cepat berarti tanpa persyaratan surat-surat yang menyulitkan, dan cepat diambil bila diperlukan tanpa harus menunggu, serta jumlah dan pelaksanaannya yang *fleksibel*.

BMT dengan produk-produk pembiayaannya, diharapkan mampu mengurangi kegelisahan sebagian masyarakat yang memiliki keterbatasan *finansial*. Baik pengusaha kecil menengah untuk tambahan modal usaha, maupun masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan yang harus memenuhi kebutuhannya dengan cara cicilan. Namun dari pada itu, minimnya informasi dari masyarakat terhadap BMT khususnya kaitannya masalah pembiayaan menjadi titik masalah baru bagi masyarakat itu sendiri. Lebih-lebih ketakutan-ketakutan mereka jika tidak mampu mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan. Hal ini wajar, karena memang BMT tidak mampu menembus lapisan masyarakat yang paling bawah. Sehingga dengan hal ini, penulis terinspirasi untuk memberikan sebuah karya yang nantinya diharapkan mampu memberikan sedikit pengetahuan tentang bagaimana pembiayaan pada BMT dan cara penyelesaiannya ketika terjadi macet dalam mengembalikan pembiayaan yang diberikan. Oleh karenanya penulis dalam penulisan ini mengambil judul : **Prosedur Pembiayaan dan Penanganan Masalah pada KJKS BMT Arafah.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah prosedur pembiayaan pada KJKS BMT Arafah?

2. Bagaimanakah prosedur atau tahapan-tahapan penanganan masalah ketika terjadi pembiayaan bermasalah?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan yang digunakan pada KJKS BMT Arafah.
2. Untuk mengetahui prosedur atau tahapan apa saja yang dilakukan oleh KJKS BMT Arafah dalam penanganan pembiayaan bermasalah.

D. Manfaat Penulisan

Penulisan yang penulis lakukan ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, maupun bagi para pembaca atau pihak-pihak lain yang berkepentingan, diantaranya:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini berhubungan erat dengan Program Diploma 3 Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta yaitu untuk memenuhi syarat-syarat kelulusan akademik guna mencapai gelar Diploma 3. Disamping itu, dengan melakukan penelitian ini diharapkan penulis dan semua pihak yang berkepentingan dapat lebih memahami bagaimana eksistensi BMT dengan salah satu produknya yaitu *Murabahah* mampu menjadi salah satu lembaga keuangan mikro yang patut diwaspadai dalam persaingan bisnis lembaga keuangan. Disamping itu

juga menjadi wawasan singkat tentang peluang bisnis di lembaga keuangan dengan hadirnya BMT.

2. Manfaat dalam implementasi atau praktik

Penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi BMT yang diteliti agar dapat menjadi lembaga yang berkelanjutan dan mampu menopang perekonomian masyarakat. Selain itu, penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam khasanah pengetahuan dan menjadi topik penulisan untuk menambah informasi termasuk sebagai salah satu acuan bagi penulisan ilmiah terkait.

E. Batasan Masalah

Mengingat begitu luasnya ruang lingkup pada penelitian ini, maka penulis membatasi permasalahan tersebut pada;

1. Melihat banyaknya Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT di Indonesia khususnya Kabupaten Sukoharjo, maka penulis dalam penulisan ini hanya menggunakan Lembaga Keuangan non bank Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Arafah dalam memberikan pembiayaan dan penanganan masalah.
2. Data penulisan yang digunakan adalah data KJKS BMT Arafah tentang pembiayaan dan penanganan masalah.

F. Metode Penulisan

1. Ruang Lingkup

Penulisan Tugas Akhir ini dilakukan dengan program magang kerja mahasiswa pada KJKS BMT Arafah untuk memperoleh data sesuai dengan materi yang ingin di tulis.

2. Jenis Data

Data yang dikumpulkan yaitu data tentang diskripsi umum KJKS BMT Arafah dan Kinerja bagian Pembiayaan dalam memberikan pembiayaan terhadap anggota.

3. Macam Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, yang diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Dalam pengumpulan data ini penulis mengadakan pengamatan dan peninjauan langsung di tempat KJKS BMT Arafah dan di lapangan. Data yang diperoleh penulis berupa prosedur pembiayaan dan penanganan pembiayaan bermasalah.

b. Data Sekunder

Data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh penulis. Data berasal dari beberapa pihak yang terkait dengan penulisan ini. Data itu berupa :

- 1) Sejarah singkat perkembangan KJKS BMT Arafah.
- 2) Visi Dan Misi KJKS BMT Arafah.

- 3) Produk KJKS BMT Arafah.
- 4) Struktur Organisasi KJKS BMT Arafah.
- 5) Diskripsi Jabatan (*Job Description*).

c. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara dan observasi partisipasi serta dengan dokumen.

a. Wawancara

Dilakukan dalam bentuk wawancara tanya jawab dengan obyek penelitian. Sebagai obyeknya yaitu bagian pembiayaan pada KJKS BMT Arafah.

b. Observasi

Dilakukan dengan cara magang kerja secara langsung pada obyek observasi. Dan proses pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah di lapangan tempat transaksi.

c. Studi Pustaka

Dilakukan dalam bentuk pengumpulan data-data dari berbagai sumber literature dan buku yang berhubungan dengan topik pembahasan dalam penulisan ini untuk memperoleh dasar teoritis yang relevan.

Pedoman wawancara digunakan agar memudahkan penulis memfokuskan perhatian dalam pengumpulan data. Sedangkan alat-alat pemotret dan pencatat digunakan agar data yang dikumpulkan tidak tercecer dan terlupakan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Ekonomi Islam

Kebahagiaan merupakan tujuan utama dari setiap manusia. Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, baik dalam aspek materiil, emosional, maupun spiritual, dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Terpenuhinya kebutuhan yang bersifat komersial, seperti sandang, papan, dan kekayaan lainnya inilah yang disebut aspek materiil yang nantinya akan berdampak pada kesejahteraan seseorang (Ekonomi Islam ; BI, 2008). Akan tetapi tidak semua orang mampu memenuhi kebutuhan itu dengan mudah, artinya sumber daya untuk mewujudkannya itu tersedia atau tidak. Sehingga dalam upaya mewujudkan kesejahteraan tersebut menghadapi kendala pokok, yaitu kurangnya sumber daya yang dapat digunakan untuk mewujudkan kebutuhan tersebut.

Pandangan Islam terhadap permasalahan ekonomi termasuk didalamnya aspek bagaimana Islam memandang tujuan hidup manusia, memahami permasalahan hidup dan ekonomi dan bagaimana Islam memecahkan masalah ekonomi. Ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari metode untuk memahami dan memecahkan masalah ekonomi yang didasarkan atas ajaran agama Islam. Perilaku manusia dan masyarakat yang didasarkan atas ajaran Islam inilah yang kemudian disebut

sebagai perilaku rasional Islam yang akan menjadi dasar pembentukan suatu perekonomian Islam (Materi Dakwah Ekonomi Syariah: PKES, 2008).

Ekonomi Islam sebenarnya telah muncul sejak Islam itu dilahirkan. Ekonomi Islam lahir bukanlah sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri melainkan bagian integral dari agama Islam. Sebagai ajaran Islam, kehidupan merupakan bagian dari agama Islam. Sebagai ajaran hidup yang lengkap, Islam memberikan petunjuk dari semua aktifitas manusia termasuk ekonomi. Sejak abad ke 6 telah muncul pemikiran-pemikiran ekonomi secara parsial, misalnya peran Negara dalam ekonomi secara *komperehensif* terhadap sistem ekonomi Islam sesungguhnya baru muncul pada pertengahan abad ke 20 dan semakin marak sejak dua dasawarsa terakhir.

Kesejahteraan merupakan tujuan dari pada ekonomi Islam itu sendiri. Namun kemudian muncul pertanyaan yaitu bagaimana cara-cara yang dibenarkan untuk mencapai kesejahteraan itu sendiri. Sedangkan sumber daya yang digunakan untuk mencapai kesejahteraan itu terbatas. Dari pertanyaan diatas maka Islam dengan perkembangan sistem ekonominya mulai eksis. Eksistensi ekonomi Islam dengan lembaga keuangan Islam dimaksudkan untuk memperlancar aktifitas ekonomi dengan mempertemukan kelompok *defisit* dengan kelompok *surplus*, menggunakan kontrak investasi atau jual-beli melalui mekanisme utamanya yaitu bagi hasil (*profit-loss sharing*) dan dengan prinsip-prinsip syar'i lainnya (Materi Dakwah Ekonomi Syariah: PKES, 2008). Disamping itu, lembaga keuangan Islam berupaya menjawab berbagai pertanyaan yang muncul terkait dengan sumber daya yang terbatas

yang dimiliki oleh umat Islam khususnya dalam upaya memberikan kesejahteraan bagi kehidupannya.

Sektor keuangan dalam Islam pada hakikatnya merupakan sektor yang berkaitan dengan arus uang, dimana aktifitas utamanya adalah investasi (Materi Dakwah Ekonomi Syariah: PKES, 2008). Sehingga sektor keuangan ini tentu kuat hubungannya dengan sektor riil, karena aktifitas investasinya adalah aktifitas produktif sektor riil. Dengan demikian tidak ada dikotomi sejajar antara riil dan moneter, jadi boleh dikatakan corak ekonomi Islam sebenarnya adalah aktifitas riil. Karena aktifitas moneter hanya singkat sebatas sarana untuk mewujudkan aktifitas riil.

Sektor keuangan dalam Islam tidak memperbolehkan aktifitas keuangan menggunakan bunga, aktifitas spekulasi dan lain-lain yang sifatnya diharamkan oleh syariah Islam. instrumen yang dapat digunakan sama dengan aktifitas pada riil yaitu mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, istisna, salam, rahn dll. Suatu hal yang banyak diyakini kalangan para ekonom dan binisman bahwa ilmu ekonomi dan aktifitas bisnis adalah sesuatu yang bersifat positif, jauh dari norma-norma relegius keagamaan. Dan itu tidak berlaku untuk Islam. Islam mengajarkan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah integral dari ilmu Islam itu sendiri. Sehingga ketika Islam melarang bunga karena itu sama dengan riba, maka umat Islam tidak memberlakukan bunga dalam sistem lembaga keuangan Islam. Tidak hanya bunga yang dipermasalahkan ekonomi Islam, namun ada beberapa kenyataan yang sangat

membedakan sistem lembaga keuangan Islam dengan konvensional saat ini, antara lain.

Tabel 2.1
Perbedaan sistem konvensional dengan syari'ah

Konvensional	Syari'ah
<ol style="list-style-type: none"> 1. Intermediasi, jasa keuangan. 2. Tidak anti <i>riba</i> dan tidak anti <i>maysir</i>. 3. Prinsip Materialistik. 4. Uang sebagai komoditi (Valas). 5. Bunga. 6. Bank Komersial (<i>profit motif</i>). 7. Kemungkinan terjadi <i>negatif spread</i>. 8. Halal & haram. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intermediasi, manajer investasi (Reksadana), Investor (memberikan dana), Sosial, jasa keuangan. 2. Anti <i>riba</i> dan <i>Maysir</i>. 3. Prinsip Syari'ah Islam. 4. Uang sebagai alat tukar bukan komoditi. 5. Bagi hasil, jual beli, sewa. 6. Sosial, ekonomi dan keuntungan, Multi fungsi. 7. Karena bagi hasil sehingga tidak mungkin terjadi <i>negatif spread</i>. 8. Halal.

Sumber : Materi Dakwah Ekonomi Syariah: PKES, 2008.

Bunga merupakan masalah penting dalam perekonomian Islam saat ini. Konsep bunga sebenarnya telah dikenal sejak zaman pertengahan Latin yang disebut dengan istilah *interesse* yang berarti pampasan karena kerugian atau bayaran pampasan. Menurut istilah lain bunga adalah pembayaran melebihi modal yang dipinjam dari pihak lain. Bunga juga dapat juga diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga diartikan sebagai harga atau kompensasi atau

ganti rugi yang dibayarkan untuk penggunaan uang selama suatu jangka waktu.

Dalam hal ini, bunga dengan riba itu memiliki kesamaan yang telah dikenal di dalam agama islam. Riba yang berasal dari bahasa arab secara etimologi diartikan sebagai tambahan, meningkat, atau membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang bertentangan dengan kaidah syar'i.

Perkembangan ekonomi dengan sistem bunga, dan konsep bunga yang telah mengakar serta telah merasuk dalam sendi-sendi sistem berekonomi masyarakat dunia, telah memasung alam pikir seseorang, sehingga menganggap praktek pembungaan pada setiap pinjaman atau transaksi hutang piutang adalah suatu hal yang wajar dan selayaknya untuk dilakukan. Rasionalitas pola pikir yang dibangun oleh mereka telah mengenyampingkan nilai keadilan yang seharusnya sebagai prinsip dasar di dalam melakukan ekonomi. Sehingga tidak menimbulkan salah satu diantaranya teraniaya. Hal inilah yang menyebabkan munculnya teori ekonomi yang menggunakan sistem bagi hasil. Banyak perbedaan antara teori ekonomi dengan sistem bunga dan bagi hasil, diantaranya bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2
Perbedaan sistem bunga dan bagi hasil

Bunga	Bagi Hasil
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung. 2. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan. 3. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. 4. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “<i>booming</i>”. 5. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh beberapa kalangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan besarnya rasio/ nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. 2. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. 3. tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. 4. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. 5. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Sumber : WWW. Hidayatullah. Com

B. Lembaga Keuangan Syariah

Seperti halnya lembaga keuangan konvensional, bahwa Lembaga keuangan syariah merupakan satu bentuk lembaga keuangan yang pengelolaannya didasarkan pada ketentuan syariat Islam. Kasmir dalam bukunya “Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya” memberikan definisi lembaga keuangan sebagai setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya.

Berdasar pada pengertian di atas, dapat diutarakan bahwa kegiatan utama dari lembaga keuangan syariah meliputi dua aspek, yaitu :

1. Menghimpun dana

Satu bentuk kegiatan yang mengambil fungsi menarik (*pull*) atau menghimpun dana masyarakat untuk dikelola oleh lembaga keuangan. Penghimpunan dana tersebut dapat melalui; tabungan, deposito (bank), iuran (dana pensiun), premi (asuransi), simpanan (koperasi), dan ZIS (zakat, infak, dan shadaqah), dan lainnya.

2. Menyalurkan dana

Kegiatan lembaga keuangan yang berorientasi pada penyaluran dana masyarakat yang terkumpul untuk diinvestasikan atau diikutsertakan dalam model-model pembiayaan yang menguntungkan. Penyaluran dana tersebut dapat melalui: pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *qardhul hasan*, penitipan modal pada lembaga keuangan lain, SWBI, *ijarah*, dll.

Lembaga Keuangan Syariah di bagi menjadi 2 bentuk, yaitu Bank dan Non Bank. Lembaga Keuangan Bank di bagi menjadi 2 yaitu Bank Umum dan BPRS. Sedangkan Lembaga Keuangan Non Bank antara lain; Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, BMT, Pasar Modal Syariah.

- a. Bank Syariah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi melalui aktifitas investasi atau jual beli, serta memberikan pelayanan jasa simpanan bagi para

nasabah. Sama halnya dengan perbankan konvensional, perbankan syariah merupakan suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang.

b. BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah)

Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum bank umum dan BPR dapat berupa Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah dan Koperasi. Atau dalam kata lain Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan bank yang khusus melayani usaha mikro di kecamatan dan pedesaan. Bank Perkreditan Rakyat berasal dari Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung Desa, Bank Pegawai yang kemudian dilebur menjadi Bank Perkreditan rakyat. Jenis produk yang ditawarkan oleh Bank Perkreditan Rakyat relatif sempit dibandingkan dengan bank umum, bahkan ada beberapa jenis jasa bank yang tidak boleh diselenggarakan oleh Bank Perkreditan Rakyat, seperti pembukaan rekening giro dan ikut kliring.

BPRS dapat bertindak sebagai lembaga *baitul ma'al* yaitu menerima dana berasal dari zakat, infaq, shadaqah, waqaf hibah atau dana sosial lainnya dan meyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan atau pinjaman kebajikan (*qardh-ul*

hasan). Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan BPRS sesuai dengan prinsip syariah.

c. Asuransi Syariah

Menurut Undang-undang No.2 Tahun 1992 Pasal 1, Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada Tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada Tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Pengertian Asuransi Syari'ah (Fatwa DSN), Asuransi syari'ah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syari'ah.

d. Pegadaian Syariah

Menurut KUH Perdata pasal 1150 Adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berhutang atau oleh seorang lain atas dirinya, dan yang memberikan kekuasaan kepada

orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Gadai dalam Fiqh Gadai (*rahn*) adalah perjanjian suatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara sebagai tanggungan pinjaman (*marhun bih*), sehingga dengan adanya tanggungan utang ini seluruh atau sebagian utang dapat diterima.

e. Pasar Modal Syariah

1) Obligasi Syariah

Obligasi merupakan surat utang jangka menengah-panjang yang dapat dipindahtangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut.

2) Reksa Dana Syariah

Reksa Dana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Selain itu Reksa Dana juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk

berinvestasi di pasar modal Indonesia. Umumnya Reksa Dana diartikan sebagai Wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya di investasikan dalam portofolio Efek oleh Manajer Investasi.

Mengacu kepada Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, pasal 1 ayat (27) didefinisikan bahwa Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.

Ada tiga hal yang terkait dari definisi tersebut yaitu, *Pertama*, adanya dana dari masyarakat pemodal. *Kedua*, dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek, dan *Ketiga*, dana tersebut dikelola oleh manajer investasi. Dengan demikian, dana yang ada dalam Reksa Dana merupakan dana bersama para pemodal, sedangkan manajer investasi adalah pihak yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut.

f. BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*)

Merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan

berlandaskan pada sistem ekonomi yang *salam* : keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan.

Peran BMT di masyarakat :

- 1) Motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak.
- 2) Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi syariah.
- 3) Penghubung antara kaum *aghnia* (kaya) dan kaum *dhu'afa* (miskin).
- 4) Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang *barakah* dan *salam*.

C. *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)

1. Pengertian BMT

Heri sudarsono dalam bukunya Bank dan Lembaga keuangan syariah mendefinisikan BMT ke dalam 2 fungsi utama :

- a. *Bait al maal* : lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti halnya *zakat, infaq, dan sadaqoh*.
- b. *Bait at-tamwil* : lembaga yang mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.

Dari definisi Sudarsono diatas dapat disimpulkan bahwa BMT mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi *non profit* department sebagai landasan historis bahwa *baitul maal* pada masa Islam klasik adalah berfungsi sebagai dana umat dan penyeimbang perekonomian, sedangkan

fungsi kedua yaitu fungsi *profit* department karena sebagai panjang tangan dari bank Syariah yang di atas sudah dijelaskan bahwa kemampuan perbankan sangat terbatas untuk menjangkau sektor usaha mikro dan kecil sehingga dibutuhkan lembaga keuangan yang komersial seperti bank sehingga dapat menjangkau sektor tersebut, dan alternatif pemikir ekonomi Islam untuk lembaga itu adalah BMT tersebut.

Baitul Maal Wattamwil (BMT) adalah kelompok swadaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dalam upaya pengentasan kemiskinan (www.Republikaonline. 14/12/01. 12.15 WIB.).

BMT adalah lembaga keuangan mikro syari'ah formal yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat berpendapatan rendah (<http://www.hidayatullah.com>, 15/10/04. 22.50 WIB.).

Baitul Maal Wattamwil (BMT)/Koperasi Syariah adalah lembaga keuangan masyarakat yang diselenggarakan dan dikelola berdasarkan prinsip dan nilai-nilai agama Islam, yang berfungsi untuk menerima dan menyalurkan dana yang bersifat komersial dari pihak ketiga yang berbentuk simpanan anggota dan penyertaan lainnya, serta dana yang bersifat non komersial seperti zakat, infaq, shodaqoh, hibah dan sumbangan lainnya.

2. Sejarah BMT (*Baitul Maal Wattamwil*)

Implikasi nilai-nilai syariah dalam bidang ekonomi adalah terbentuknya lembaga-lembaga keuangan yang berlandaskan nilai-nilai syariah. Sampai awal abad 20 untuk mendirikan lembaga perbankan dan keuangan syariah belum beranjak dari area diskusi teoritis semata. Hal ini berkelanjutan hingga lahirnya The Mith Ghamr Bank di Mesir tahun 1963. The Mith Ghamr Bank merupakan contoh bank Islam pertama yang beroperasi di pedesaan.

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia (Antonio, 1999). Pada awal periode 1980 an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Raharjo, A.M. Saefuddin, M.Amin Azis dan lain-lain. Beberapa uji coba dalam skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Diantaranya adalah *Baitut Tamwil* – Salman, Bandung yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yakni koperasi Ridho Gusti. Sedangkan perkembangan bank syariah di tanah air mendapat pijakan setelah adanya deregulasi sektor perbankan tahun 1983. Hal ini karena sejak saat itu diberi keleluasaan, penentuan tingkat suku bunga, termasuk nol persen (atau peniadaan bunga sekaligus). Sesungguhnya kesempatan inipun tidak termanfaatkan karena tidak diperkenankannya membuka kantor cabang baru.

Dengan terbitnya PP no. 72 tahun 1992 tentang bank bagi hasil yang secara tegas memberikan batasan bahwa bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil sebaliknya pula bank yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil (pasal 6). Namun prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990 menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua Bogor Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam di Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di hotel Sahid Jaya Jakarta, 22 – 25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat MUNAS IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia.

Di Indonesia bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat. Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara muslim yang lain, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada tahun 1992-1998 hanya ada satu unit bank syariah di Indonesia, maka pada tahun 1999 jumlahnya menjadi 3 unit. Pada tahun 2000, bank syariah maupun bank konvensional yang membuka unit usaha syariah telah meningkat menjadi 6 unit. Sedangkan jumlah BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) sudah mencapai 86 unit dan masih akan terus bertambah.

Dari sebuah riset yang dilakukan oleh Karim Business Consulting, diproyeksikan bahwa total aset bank syariah di Indonesia akan tumbuh sebesar 2850% selama 8 tahun, atau rata-rata tumbuh 356.25% tiap tahunnya. Sebuah pertumbuhan aset yang sangat mengesankan. Tumbuh kembangnya aset bank syariah ini dikarenakan adanya kepastian disisi regulasi serta berkembangnya pemikiran masyarakat terhadap keberadaan bank syariah. Dan sebagai salah satu multiplier efect yang lain dari kemudahan berdirinya bank syariah dengan dikeluarkannya undang-undang oleh Bank Indonesia yang mengatur permasalahan tersebut adalah munculnya sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang lebih dekat dengan kalangan masyarakat bawah, hal ini juga didorong oleh rasa keprihatinan yang mendalam terhadap banyaknya masyarakat miskin (*notabenenya* umat Islam) yang terjerat oleh *rentenir* dan juga dalam rangka usaha memberikan alternatif bagi mereka yang ingin mengembangkan usahanya yang tidak dapat berhubungan secara langsung dengan bank Islam dikarenakan usahanya tergolong kecil dan mikro , maka pada tahun 1992 lahirlah sebuah lembaga keuangan yang beroperasi menggunakan gabungan konsep *Baitul Mal* dan *Baitut Tamwil*, yang target, sasaran, serta skalanya pada sektor usaha mikro. Dengan semakin banyaknya orang-orang yang memiliki perhatian terhadap lembaga kecil ini serta disamping juga perlu adanya pembinaan pada BMT-BMT serta dibutuhkan adanya perantara untuk terjalinnya komunikasi dan jaringan antar BMT ataupun penghubung BMT kepada

lembaga ekonomi yang lebih besar baik pemerintah atau swasta, dan tentunya juga dalam usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan BMT dimasa depan, maka berdiri pulalah lembaga pembina BMT yang berupa Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM), apakah itu yang bernama Pusat Pengkajian dan Pengembangan Usaha Kecil (P3UK), Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil (PINBUK) maupun Dompot Dhuafa (DD) Republika. Dan yang sampai saat ini masih dengan sangat intensif melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap BMT-BMT yang telah dan akan berdiri adalah PINBUK.

Sejak didirikan pada 1995, Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) telah mengibarkan bendera dakwahnya dengan memberdayakan para pengusaha kecil. Ini dilakukan dengan mendirikan berbagai lembaga keuangan alternatif yang berprinsip syariah di lapisan kelas menengah kebawah. Lembaga keuangan itu bernama *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) atau padanan kata dari Balai Usaha Mandiri Terpadu. BMT menerapkan prinsip syariah atau bagi hasil yang sangat mudah dikenalkan pada masyarakat baik di perkotaan maupun pedesaan. Masyarakat di Indonesia memang sudah akrab dengan pola bagi hasil. Masyarakat Aceh, misalnya, dalam mengelola sawah sudah lama menggunakan sistem mawah bagi hasil antara pemilik sawah dengan petani pengelola dengan bagi hasil 50:50. Dengan kata lain, apa yang kini dipraktekkan seluruh BMT adalah wujud reinkarnasi kultural berekonomi masyarakat tempo dulu dalam bentuk pelembagaan yang

lebih modern dan sesuai dengan tuntutan zaman. Pelembagaan BMT diilhami oleh sejarah kuatnya posisi lembaga-lembaga ekonomi di masa awal kebangkitan ekonomi umat Islam. Sebut saja lembaga baitul maal (rumah harta) yang lahir di zaman Rasulullah SAW. Lembaga ini berfungsi sebagai badan logistik umat Islam. Namun demikian, *baitul maal* dan BMT punya banyak perbedaan, baik sejarah maupun perannya (www.pikiranrakyat.com).

Melihat kondisi perkembangan BMT semakin meluas, Pemerintah tidak tinggal diam. Sejak munculnya gejala-gejala perkembangan BMT, sebelum tahun 2004 pemerintah menetapkan badan hukum BMT dengan KSU (Koperasi Serba Usaha) dan KSP (Koperasi Simpan Pinjam). Namun seiring berjalannya waktu, melihat bahwa semakin kompleksnya permasalahan dalam BMT, maka pada tahun 2004 dengan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor: 91/KEP/M.KUKM/IX/2004, BMT resmi berbadan hukum KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah). Sehingga dengan ini, BMT lebih mudah dalam menyelesaikan masalah-masalah intern maupun eksteren dari BMT itu sendiri, karena telah memiliki aturan resmi yang khusus mengatur BMT.

3. Visi, Misi dan Tujuan BMT

BMT sejak dibentuk telah memiliki visi, misi, dan tujuan dalam perkembangannya, yaitu:

a. Visi

Adalah mewujudkan kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai dan sejahtera dengan mengembangkan lembaga dan usaha BMT dan POKUSMA (Kelompok Usaha Muamalah) yang maju berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan berkehati-hatian.

b. Misi

Adalah mengembangkan POKUSMA dan BMT yang maju berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan berkehati-hatian sehingga terwujud kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera.

c. Tujuan

BMT bertujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga dan masyarakat disekitar BMT yang selamat, damai dan sejahtera.

4. Kegiatan utama BMT

BMT melaksanakan dua jenis kegiatan yaitu *Baitut Tamwil* dan *Baitul Maal*. *Baitut Tamwil* bergiat mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi. Sedangkan *Baitul Maal* menerima titipan zakat, infaq dan shadaqoh serta menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Kegiatan yang dikembangkan BMT adalah:

- a. Menggalang dan menghimpun dana yang dipergunakan untuk membiayai usaha-usaha anggotanya. Modal awal BMT diperoleh dari simpanan pokok khusus para pendiri. Selanjutnya BMT mengembangkan modalnya dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela anggota. BMT bekerja sama dengan berbagai pihak yang mempunyai kegiatan yang sama seperti BUMN (Badan Usaha Milik Negara), proyek-proyek pemerintah, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan organisasi lainnya untuk memperbesar modal. Para penyimpan akan memperoleh bagi hasil yang mekanismenya sudah diatur dalam BMT.
- b. Memberikan pembiayaan kepada anggota sesuai dengan penialain kelayakan yang dilakukan oleh pengelola BMT bersama anggota yang bersangkutan. BMT akan mendapat bagi hasil sesuai aturan yang ada sebagai imbalan atas jasa pembiayaan.
- c. Mengelola usaha simpan pinjam itu secara professional sehingga kegiatan BMT bisa menghasilkan keuntungan dan dapat dipertanggung jawabkan.
- d. Mengembangkan usaha-usaha disektor riil yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan menunjang usaha anggota. Misalnya: distribusi dan pemasaran, penyediaan bahan baku, sistem pengelolaan dan lainnya.

5. Kegiatan penunjang BMT

Kegiatan penunjang usaha bagi BMT adalah dari sisi kegiatan sosial yakni untuk membantu meringankan beban ekonomis anggota dengan tidak mengambil keuntungan finansial. Kegiatan sosial ditempuh dengan:

- a. Memberikan bantuan berupa pinjaman untuk kegiatan non produktif seperti : berobat, biaya sekolah, dan lain-lain. Bantuan tidak komersial dibutuhkan oleh sebagian anggota BMT terutama pada tahap awal mereka menjadi anggota.
- b. Pembiayaan untuk belajar usaha diberikan kepada anggota yang sangat miskin dan mempunyai keinginan memulai usaha. Sebagai pengusaha pemula, anggota ini belum mempunyai keterampilan dan pengalaman, sehingga belum layak menerima pembiayaan dari dana untuk bisnis.
- c. Pendidikan dan bimbingan usaha secara informal dan nonformal kepada anggota yang menerima pembiayaan agar mampu mengembangkan usaha dan bisa mempertanggung jawabkan pembiayaan yang diterimanya.
- d. Pendidikan dan bimbingan pemanfaatan hasil usaha yang diperoleh anggota agar benar-benar bermanfaat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Dalam hal ini BMT harus mampu menanamkan keteguhan hati agar anggota membelanjakan hasil usaha itu sesuai dengan kebutuhan.

- e. Pendidikan dan penyuluhan moral serta peningkatan kesejahteraan yang dilaksanakan secara sistematis dan terencana, seperti pendidikan tentang budi pekerti, penyuluhan kesehatan, kebersihan, pendidikan anak, keutuhan keluarga dan lain-lain.
- f. BMT sebagai wahana pengorganisasian dan pendidikan kelompok masyarakat dengan demikian juga memperkuat masyarakat. (<http://WWW.Republikaonline.Com>. 14/12/01. 12.15 WIB).

6. Produk-produk BMT

Badan hukum BMT adalah koperasi dan untuk sekarang ini BMT lebih mengarah Koperasi Jasa Keuangan Syariah sesuai petunjuk teknis Pendirian Koperasi Syariah. BMT dalam menjalankan usahanya tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip syariah yang mengatur seluruh operasionalnya. Prinsip dasar inilah yang akan dijadikan sebagai pijakan atau landasan untuk mengembangkan produk-produk BMT. Berdasarkan landasan tersebut, secara umum keseluruhan transaksi atau operasional di BMT dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu:

a. Penghimpunan Dana

Mekanisme operasional penghimpunan dana BMT secara garis besar ada dua prinsip operasional syariah yang telah diterapkan secara luas yaitu *Wadiah* artinya dana tersebut sebagai titipan dan prinsip *Mudharabah* sebagai investasi.

1) Prinsip *Wadiah*

Prinsip *wadiah* terbagi dua yaitu *Wadiah Al Amanah* dan *Wadiah Yadh-amanah* :

a) *Wadiah Amanah*

Adalah antara lain pelayanan kontak simpanan (*safe deposit box*) dan pelayanan administrasi dokumen (*custodian*).

BMT mendapatkan imbalan dari jasa penyimpanan tersebut.

Namun demikian BMT tidak boleh memanfaatkan barang yang dititipkan.

b) *Wadiah Yadh-amanah*

Adalah dana yang dititipkan boleh digunakan untuk usaha BMT dan boleh memberikan bonus pada saat kondisi BMT surplus sesuai kebijakan namun bonus tersebut tidak diperjanjikan. Akad *wadiah* dapat diterapkan dalam bentuk produk rekening tabungan BMT.

2) Prinsip *Mudharabah*

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana, prinsip *mudharabah* terbagi dua yaitu, *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

a) *Mudharabah Muttlaqah*

Dalam kegiatan penghimpunan dana dengan prinsip *mudharabah mutlaqah* dapat diterapkan untuk pembukaan rekening deposito atau simpanan berjangka. Berdasarkan

prinsip ini tidak ada pembatasan bagi BMT dalam menggunakan dana yang dihimpun. Namun demikian karena sifatnya investasi perlu adanya kesepakatan nisbah bagi hasil dengan pihak pemilik dana (*shohibul maal*).

b) *Mudharabah Muqayyadah*

Jenis ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank. Karakteristik dari simpanan ini adalah sebagai berikut:

(1) Pemilik dana menetapkan syarat penyaluran dana.

Untuk itu bank wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.

(2) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening simpanan khusus dengan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.

(3) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan kepada pemilik dana.

b. Penyaluran Dana

Dalam penyaluran dana BMT harus berpedoman kepada prinsip kehati-hatian. Sehubungan hal ini bmt diwajibkan untuk meneliti

secara seksama calon nasabah penerima dana berdasarkan azas pembiayaan yang sehat. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penyaluran dana perbankan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Dalam menyalurkan dana kepada nasabah, secara garis besar terdapat empat kelompok operasional syariah, yaitu prinsip jual beli (*bai'*), sewa beli (*ijarah waiqtina*), bagi hasil (*syirkah*), dan pembiayaan lainnya.

1) Prinsip Jual Beli (*Bai'*)

a) *Murabahah*

Prinsip *murabahah* umumnya diterapkan dalam pembiayaan pengadaan barang investasi. Skema ini paling banyak digunakan karena sederhana dan menyerupai kredit investasi pada BMT konvensional. Skema sangat berguna bagi orang yang membutuhkan barang secara mendesak tetapi kekurangan dana. Ia kemudian meminta pada BMT untuk membiayai pembelian barang tersebut dan bersedia menebusnya pada saat barang diterima. Harga jual pada pemesanan adalah harga pokok yang ditambah margin keuntungan yang disepakati. Kesepakatan harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan tidak dapat berubah menjadi lebih mahal selama berlakunya akad.

b) *Salam*

Salam adalah pembelian barang untuk penghantaran (*delivery*) yang ditangguhkan dengan pembayaran di muka. *Salam* dalam perbankan biasanya diaplikasikan pada pembiayaan berjangka pendek untuk produksi agribisnis atau industri sejenis lainnya. Mengingat BMT tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan (*inventory*), maka dimungkinkan bagi BMT untuk melakukan akad salam kepada pembeli kedua seperti bulog, pedagang pasar induk, atau rekanan. Mekanisme ini disebut dengan *Paralel Salam*.

c) *Istishna'*

Prinsip *istishna'* menyerupai salam, namun *istishna'* pembayarannya dapat dimuka, dicicil atau dibelakang. Skim *istishna'* dalam BMT umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur, industri kecil-menengah dan konstruksi.

2) Prinsip Sewa Beli (*Ijarah Wa iqtina / Ijaarah Muntahiyyah Bittamlik*)

Ijarah Wa iqtina (Ijarah Muntahiyyah Bittamlik) adalah akad sewa-menyewa suatu barang antara BMT dengan nasabah dimana nasabah diberi kesempatan untuk membeli obyek sewa pada akhir akad atau dalam dunia usaha dikenal dengan *finance*

lease. Harga sewa dan harga beli ditetapkan bersama diawal perjanjian.

3) Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

a) *Musyarakah*

Musyarakah dalam BMT biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana anggota dan BMT sama-sama menyediakan dana untuk membayai proyek tersebut. Modal yang disetor bisa berupa uang, barang perdagangan (*trading asset*), *property*, *equipment*, atau *intangible asset* (seperti hak paten dan *goodwill*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Semua modal dicampur untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi sesuai kontribusi modal.

b) *Mudharabah Muttlaqah*

Jumlah modal yang diserahkan kepada anggota selaku pengelola modal harus berupa uang tunai dan apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan

disepakati bersama. Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* diperhitungkan dengan cara:

- (1) Perhitungan dari pendapatan usaha (*revenue sharing*).
- (2) Perhitungan dari keuntungan usaha (*profit sharing*).

Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. BMT selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.

c) *Mudharabah Muqayyadah*

Karakteristik *mudharabah muqayyadah* pada dasarnya sama dengan persyaratan *mudharabah mutlaqah*. Perbedaannya adalah penyediaan modal hanya untuk kegiatan tertentu dan dengan syarat yang sepenuhnya ditetapkan oleh BMT.

4) Pembiayaan lainnya

a) *Qardh*

- (1) Sebagai jasa atas suatu produk pembiayaan seperti *mudharabah*, dimana anggota yang diberikan suatu plafon pembiayaan dan sudah memakainya membutuhkan dana cepat untuk menutupi suatu pembayaran dan akan dikembalikan secepatnya sejumlah yang dipinjam dari *qardh* ini.

(2) Sebagai produk untuk anggota *funding* yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak dapat menarik dananya karena tersimpan dalam simpanan yang tidak dapat segera di cairkan, seperti deposito.

(3) Sebagai *compensating balance* dan dana talangan antar BMT.

(4) Sebagai produk untuk sosial seperti untuk usaha kecil.

b) *Hiwalah* (Anjak Piutang)

Tujuan fasilitas *hiwalah* adalah untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. BMT mendapat imbalan (*fee*) atas jasa pemindahan piutang tersebut. Besarnya imbalan atas jasa pemindahan piutang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara BMT dengan nasabah sesuai kadar usaha dan/atau hasil yang diperoleh.

c) *Rahn* (Gadai)

Tujuan pemberian fasilitas *rahn* adalah untuk membantu anggota dalam pembiayaan kegiatan multiguna. Kontrak *rahn* dipakai dalam BMT dalam dua hal:

(1) Sebagai prinsip, artinya sebagai akad tambahan terhadap produk lain seperti *mudharabah*. BMT harus menahan barang nasabah sebagai konsekuensi dari akad ini.

(2) Sebagai produk pinjaman, artinya BMT tidak memperoleh apa-apa kecuali imbalan atas penyimpanan, pemeliharaan, asuransi dan administrasi barang yang digadaikan.

5) *Ijarah*

BMT mendapatkan imbalan sewa (*Ujrah*) atas barang yang disewakannya. Pemeliharaan barang yang disewakan dilakukan berdasarkan kesepakatan.

Fungsi Sosial :

- a) Kepedulian sosial merupakan salah satu fungsi yang tidak terpisahkan dalam BMT. Dalam melakukan fungsi sosial tersebut sebagai lembaga *Baitul Maal* yang menerima dan menyalurkan dana kebajikan. Guna menjalankan kegiatan tersebut bank syariah/Unit Usaha Syariah wajib membentuk satuan kerja yang mengelola dana kebajikan.
- b) Sumber dana kebajikan dapat diperoleh dari Zakat, Infaq, Shadaqah, hibah ataupun dana sosial lainnya. Sedangkan penyalurannya ditujukan kepada orang yang berhak (*mustahiq*), disalurkan dalam bentuk santunan (*grant*) ataupun pinjaman kebajikan (*Qardhul Hasan*).

7. Permasalahan Pembiayaan BMT (*Baitul Maal waat Tamwil*)

Permasalahan BMT terjadi ketika anggota pembiayaan mengalami tunggakan dalam pengangsuran. Yang dalam hal ini dapat dikelompokkan dalam kategori sebagai berikut.

- a. Lancar adalah anggota yang membayar angsuran kurang dari 31 hari.
- b. Dalam Perhatian Khusus adalah anggota yang membayar angsuran antara 32 – 93 hari setelah jatuh tempo.
- c. Kurang Lancar adalah anggota yang membayar angsuran antara 94 – 186 hari setelah jatuh tempo.
- d. Diragukan adalah anggota yang membayar angsuran antara 187 – 279 hari setelah jatuh tempo.
- e. Macet adalah anggota yang membayar angsuran diatas 280 hari setelah jatuh tempo.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KJKS BMT Arafah

1. Sejarah singkat perkembangan KJKS BMT Arafah

BMT Arafah merupakan lembaga keuangan syariah yang berbadan hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah, artinya dalam hal ini BMT Arafah berbadan hukum Koperasi. Awal ide untuk mendirikan BMT Arafah ini muncul pada pertengahan Desember 2006 yang dipromotori oleh tiga serangkai Arafah Grup yaitu Ustd. Rakhmad Setyawan, Ustd. Krishna Adityangga, Ustd. Didik Iskandar. Setelah persiapan panjang, maka pada 8 Januari 2007 BMT Arafah ini resmi *launching* dibawah naungan CV. Arafah Grup. Akan tetapi BMT Arafah telah mandiri menjalankan manajemennya, sehingga tidak terikat banyak dengan CV. Arafah Grup dalam pengelolaannya. Disamping itu, BMT Arafah telah memiliki otonomi sendiri dalam menentukan kebijakan-kebijakannya terkait dengan keberlangsungan BMT.

Menjamurnya lembaga keuangan khususnya KJKS BMT yang hanya berorientasi keuntungan semata tanpa memperdulikan permasalahan-permasalahan umat Islam khususnya, sehingga dalam perkembangannya justru mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah, inilah yang tidak menyelesaikan kerinduan umat Islam tentang perekonomian yang halal. Maka dari itu, munculnya BMT Arafah dengan

layanan jasa keuangan syariah berusaha untuk melakukan pemurnian dan pendisiplinan pada pelayanan dan peluncuran produk layanan jasa keuangan syariah sehingga tetap dalam koridor syar'i. Seperti lembaga keuangan lainnya, BMT Arafah memberikan layanan produk jasa keuangan berupa simpan pinjam dan beberapa layanan jasa keuangan lainnya tentunya yang masih dalam koridor syar'i tetapi tetap menguntungkan.

Dengan mengedepankan prinsip syar'inya justru kerinduan ummat Islam sedikit demi sedikit mulai terjawab. Hal ini dibuktikan oleh asset yang dimiliki BMT Arafah. Pada permulaan berdirinya BMT Arafah ini hanya bermodalkan sekitar 15 juta yang terdiri dari 10 juta dalam investaris barang dan 5 juta dalam bentuk uang *cash*. Dengan ini BMT Arafah mampu mengembangkan assetnya menjadi 8,1 juta rupiah. Dan ditahun kedua ini, asset yang dimiliki oleh BMT sudah mencapai 2,6 Milyar. Kemajuan yang cepat ini tidak lain karena usaha dan keistiqomahan dari pengurus untuk senantiasa mengedepankan prinsip syar'i dalam penghimpunan dana, penyaluran dana dan penyelesaian masalah.

2. Visi Dan Misi KJKS BMT Arafah

a. Visi

Menjadi Lembaga Keuangan Syariah terdepan dan terbaik dengan layanan yang jujur, amanah, dan profesional.

b. Misi

- 1) Mewujudkan standar pelayanan berprinsip syariah secara *syumul*.
- 2) Mewujudkan standar pelayanan cepat dan memuaskan.
- 3) Mewujudkan standar pelayanan sesuai *good corporate governance*.
- 4) Menciptakan inovasi produk dan layanan terdepan dalam inovasi dan memuaskan.
- 5) Menciptakan komunitas masyarakat muslim dengan standar ekonomi yang terus berkembang.

3. Produk KJKS BMT Arafah

a. Produk Simpanan

- 1) Simpanan *Wadiah* Reguler
 - a) Akad *Wadiah yad Dhamanah*.
 - b) Setoran dengan penarikan setiap saat (sesuai dengan jam buka kantor).
 - c) Setoran awal Rp. 10.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-.
 - d) Bebas biaya administrasi bulanan.
 - e) Bonus simpanan bersifat sukarela, tanpa diperjanjikan sebelumnya.

- f) Aplikasi pembukuan rekening baru dengan menyertakan fotocopy KTP dan dikenakan biaya sebesar Rp. 3.000,-.
- g) Saldo simpanan minimal Rp. 10.000,- dan jika penarikan sampai Rp. 0,- maka rekening status off.
- h) Jika ingin tutup rekening maka saldo bisa diambil semua, tetapi jika tidak minimal saldo yang tersisa Rp. 10.000,-.
- i) Jika mengajukan pembiayaan, maka harus memiliki simpanan minimal Rp. 50.000,-.

2) Simpanan Haji Arafah

- a) Akad *Wadiah yad Dhamanah*.
- b) Setoran setiap saat (sesuai jam buka kantor).
- c) Setoran awal Rp. 500.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000,-.
- d) Bebas biaya administrasi bulanan.
- e) Tidak ada bonus simpanan, tetapi terdapat fasilitas-fasilitas sebagai pengganti bonus.
- f) Aplikasi pembukuan rekening baru dengan menyertakan fotocopy KTP dan dikenakan biaya sebesar Rp. 3.000,-.
- g) Penarikan simpanan digunakan untuk keperluan pendaftaran Ibadah Haji dan pelunasan biaya perjalanan Ibadah Haji (BPIH/ONH) ke Departemen Agama.
- h) Penarikan simpanan diluar aktivitas tersebut diatas, dengan pengajuan tertulis untuk dimintakan persetujuan pengurus.

i) Fasilitas yang melekat bagi anggota simpanan Haji. Antara lain sebagai berikut:

- (1) Buku panduan Haji pada saat aplikasi pembukuan rekening.
- (2) Konsultasi Haji bersama Ustadz H. Muh Sholeh Ibrohim, S.Th.I (secara komunal atau personal).
- (3) Cinderamata Eksklusif untuk keperluan Haji.
- (4) Dana talangan Haji sebesar Rp. 5.000.000,- dengan tempo pengembalian selama 6 bulan bagi yang berminat.

j) Prosedur pendaftaran Ibadah Haji:

- (1) Aplikasi pembukuan tabungan Haji di Bank Penerima BPIH (BRI, BRI Syariah, BNI, BNI Syariah, Bank Muamalat, Bank Mandiri, BSM, BTN, BTN Syariah).
Syarat : besar tabungan Rp. 20.500.000,- , fotocopy KTP 2 lembar.
- (2) Pendaftaran Ibadah Haji di Departemen Agama (sesuai alamat KTP) dengan cara mengisi Surat Permohonan Pendaftaran Haji (SPPH) yang disediakan di Depag dengan menyertakan fotocopy KTP 10 lembar, Buku tabungan Haji dari Bank, surat sehat dari puskesmas setempat, pas foto terbaru (terkait kebijakan masing-masing Depag).

(3) Membawa SPPH yang telah disahkan pejabat Depag dan buku tabungan haji untuk kemudian melakukan Online Siskohat di bank terkait.

(4) Memperoleh Nomor Porsi Haji dari bank terkait, kemudian kembali ke Depag untuk menyerahkan arsip terkait perolehan Nomor Porsi Haji.

3) Simpanan Walimah

- a) Akad *Wadiah yad Dhamanah*.
- b) Setoran setiap saat (sesuai jam buka kantor).
- c) Setoran awal Rp. 20.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,-.
- d) Bebas biaya administrasi bulanan.
- e) Bonus simpanan bersifat sukarela, tanpa diperjanjikan sebelumnya.
- f) Aplikasi pembukaan rekening baru dengan menyertakan fotocopy KTP dan dikenakan biaya sebesar Rp. 3.000,-.
- g) Penarikan simpanan hanya untuk keperluan *Walimatul Ursy*.
- h) Penarikan simpanan di luar aktivitas tersebut diatas, dengan pengajuan tertulis untuk dimintakan persetujuan pengurus.

4) Simpanan *Qurban/Aqiqoh*

- a) Akad *Wadiah yad Dhamanah*.
- b) Setoran setiap saat (sesuai jam buka kantor).

- c) Setoran awal Rp. 20.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,-.
- d) Bebas biaya administrasi bulanan.
- e) Bonus simpanan bersifat sukarela, tanpa diperjanjikan sebelumnya.
- f) Aplikasi pembukaan rekening baru dengan menyertakan fotocopy KTP dan dikenakan biaya sebesar Rp. 3.000,-.
- g) Penarikan simpanan hanya untuk keperluan *Qurban/Aqiqoh*.
- h) Penarikan simpanan di luar aktivitas tersebut diatas, dengan pengajuan tertulis untuk dimintakan persetujuan pengurus.

5) Simpanan Pendidikan

- a) *Akad Wadiah yad Dhamanah*.
- b) Diperuntukkan bagi Ustadz/Ustadzah/Bapak/Ibu Guru TK/SD/MI maupun pendidikan lainnya.
- c) Setoran dan penarikan setiap saat (sesuai jam buka kantor).
- d) Setoran awal Rp. 10.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-.
- e) Bebas biaya administrasi bulanan.
- f) Bonus simpanan bersifat sukarela, tanpa diperjanjikan sebelumnya.
- g) Aplikasi pembukaan rekening baru dengan menyertakan fotocopy KTP dan tidak dikenakan biaya.

- h) Adanya fasilitas yang melekat bagi anggota simpanan pendidikan, yang akan diberikan pada saat tertentu (akhir atau awal tahun ajaran).
- i) Fasilitas dapat berupa *cash money*, barang/*souvenir*, maupun kegiatan/*training*.

6) Simpanan Masjid

- a) Akad *Wadiah yad Dhamanah*.
- b) Diperuntukkan Bapak/Ibu Ta'mir Masjid, Ustadz/Ustadzah TPQ, maupun pengelola kegiatan masjid lainnya.
- c) Setoran dan penarikan setiap saat (sesuai jam buka kantor).
- d) Setoran awal Rp. 20.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,-.
- e) Bebas biaya administrasi bulanan.
- f) Bonus simpanan bersifat sukarela, tanpa diperjanjikan sebelumnya.
- g) Aplikasi pembukaan rekening baru dengan menyertakan fotocopy KTP dan dikenakan biaya sebesar Rp. 3.000,-.

7) Simpanan *Qurrotaa'yun*/Pendidikan Anak

- a) Akad *Mudharabah Muthlaqoh*
- b) Sistem debet simpanan dari simpanan *wadiah regular* orang tua.
- c) Pilihan setoran setiap bulannya : Rp. 50.000,-, Rp. 100.000,-, Rp. 150.000,-.

- d) Nisbah bagi hasil anggota dengan BMT Arafah sebesar 50% : 50%.
 - e) Jatuh tempo simpanan pada saat anak masuk TK, SD, naik kelas 4, masuk SLTP, masuk SLTA, dan masuk Perguruan Tinggi.
 - f) Perpanjangan simpanan dengan mendapatkan pencairan simpanan maksimal sebesar 60% dari saldo simpanan (pokok+Bagi hasil).
 - g) Pencairan simpanan pada saat jatuh tempo dengan menunjukkan fotocopy raport atau keterangan lain dari sekolah.
 - h) Setiap Orang Tua dapat melakukan aplikasi pembukuan lebih dari satu anak.
 - i) Usia anak minimal 2 tahun dan maksimal 14 tahun.
 - j) Gagal debet rekening selama 3 kali berturut-turut, anggota dianggap mengakhiri kesertaan dalam simpanan ini.
 - k) Kebijakan terhadap gagal debet rekening akan dibicarakan sesuai azas kekeluargaan.
- 8) Simpanan *Mudharabah* Berjangka
- a) Akad *Mudharabah Muthlaqoh*.
 - b) Investasi minimal Rp. 500.000,-.
 - c) Jangka waktu simpanan terdiri atas 1, 3, 6, dan 12 bulan.

- d) Nisbah bagi hasil dengan anggota dengan BMT sebesar 30% : 70% (1bulan), 45% : 55% (3 bulan), 50% : 50% (6 bulan), 55% : 45% (12 bulan).
- e) Aplikasi pembukuan rekening baru dengan menyertakan fotocopy KTP dan dikenakan biaya sebesar Rp. 3.000,-.
- f) Bagi hasil akan diperhitungkan setiap akhir bulan dan akan ditambahkan ke rekening simpanan penyalir pada tanggal jatuh tempo.
- g) Simpanan *Mudharabah* Berjangka tidak dapat dipindahtangankan, namun dapat dijamin kepada BMT Arafah sebagai surat berharga dalam hal pengikatan atau penghapusan terhadap sesuatu kewajiban atau hutang.
- h) Simpanan *Mudharabah* Berjangka dapat diperpanjang secara otomatis sesuai dengan permintaan penyalir, dengan nisbah bagi hasil yang berlaku pada saat perpanjangan.
- i) Apabila simpanan *Mudharabah* Berjangka tidak diperpanjang secara otomatis, maka simpanan akan dipindahbukukan sebagai simpanan *wadiah regular*.

b. Produk Pembiayaan

1) *Murabahah*

Akad jual beli dengan membayar harga pokok dan keuntungan sesuai kesepakatan bersama. Atau dalam bahasa lain,

Murabahah merupakan pembiayaan berakad jual beli, artinya transaksi jual beli dimana BMT menyebut jumlah keuntungannya, dan BMT bertindak sebagai penjual sementara anggota/nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli BMT dari pemasok ditambah keuntungan.

2) *Mudharabah*

Akad antara dua pihak atas penyerahan uang dari satu pihak ke pihak lain untuk kegiatan usaha dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan (nisbah). Atau dalam bahasa lain merupakan suatu perjanjian pembiayaan antara BMT dan anggota/nasabah dimana BMT menyediakan dana untuk penyediaan modal kerja sedangkan peminjam berupaya mengelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya.

3) *Musyarakah*

Usaha bersama dimana semua pihak menyumbangkan modal dan keahlian. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut kesepakatan dan kerugian dibagi menurut porsi modal masing-masing. Atau dalam bahasa lain adalah penyertaan BMT sebagai pemilik modal dalam suatu usaha yang mana antara resiko dan keuntungan ditanggung bersama secara berimbang dengan porsi penyertaan.

4) *Ijarah*

Penggunaan manfaat dengan pembayaran sebagai gantinya (sewa). Bisa berbentuk tenaga/keahlian atau jasa dan tempat. Dalam kata lain prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Bila dalam jual beli obyek transaksinya adalah barang, maka dalam ijarah obyek transaksinya adalah jasa. Sehingga pada masa akhir sewa, BMT dapat menjual barang yang disewakannya kepada nasabah, atau biasa disebut sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan.

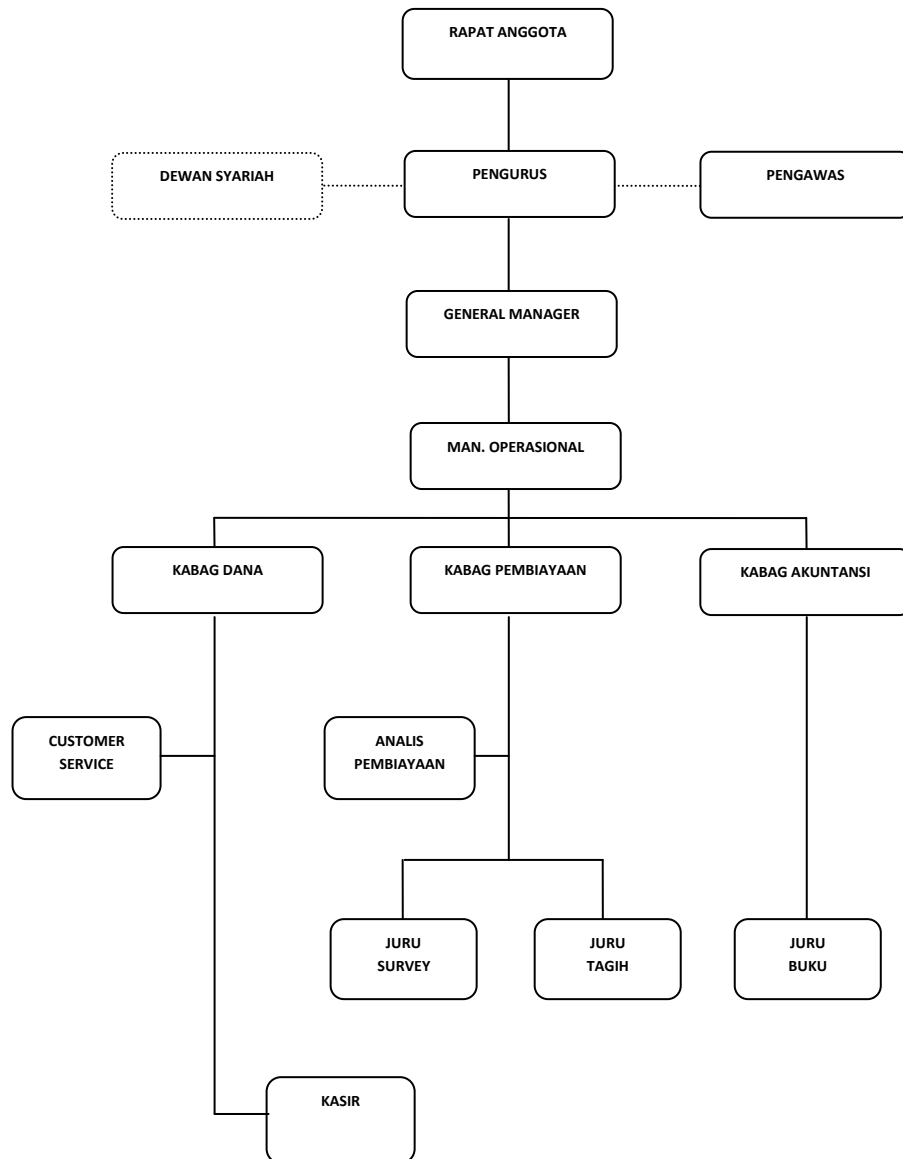
5) *Istishna*

Jual beli yang barangnya dibayar berdasarkan kesepakatan. Barang diberikan kemudian karena harus dibuat terlebih dahulu. Atau dalam artian akad bersama pembuat (produsen) untuk suatu pekerjaan tertentu dalam tanggungan, atau akad jual beli suatu barang yang akan dibuat terlebih dahulu oleh pembuat (produsen) yang juga sekaligus menyediakan kebutuhan bahan baku barangnya. Jika bahan baku disediakan oleh pemesan, akad ini menjadi akad *ujrah* (upah).

6) *Qord*

Pinjaman uang dimana si pemberi pinjaman tidak boleh mensyaratkan keuntungan.

4. Struktur Organisasi KJKS BMT Arafah



Gambar 3.1
Struktur Organisasi KJKS BMT Arafah

Keterangan Gambar 3. 1 :

Dewan Pertimbangan Syariah

1. Abu Fatihah Al Adnani
2. Tri Asmoro Kurniawan

Dewan Pengawas

Ketua : Suyanto

Anggota : Muhammad Idris, SE.
Winarno

Dewan Pengurus

Ketua Pengurus : Krisna Adityangga, SEI. MSi.

Sekretaris : Rakhmat Setyawan, A. Md.

Bendahara : Didik Nur Iskandar, SEI.

Pengelola

Pendanaan : Eko Pujiatmoko, SE.

Pembiayaan : Heru Suyatno

Penagihan : Suyatno

Teller : Sigit Ariyadi, S.Psi.

Administrasi : Endarwidi Priantoro, SE.

5. Diskripsi Jabatan (*Job Description*)

- a. Rapat Anggota
 - 1) Rapat anggota pemegang kekuasaan tertinggi.
 - 2) Menetapkan AD dan ART.

- 3) Mempertimbangkan, memilah, menyetujui laporan pengurus dan pengawas, rencana kerja dan RAPB KJKS yang akan datang.
 - 4) Memilih, mengangkat, dan atau memberhentikan pengurus dan pengawas jika terbukti melakukan tindakan yang bertentangan dengan keputusan rapat anggota dan kepentingan anggota yang tidak sesuai AD/ART.
 - 5) Mengatur pembagian SHU.
 - 6) Melaksanakan amandemen terhadap Anggaran Dasar.
 - 7) Mempertimbangkan dalam proses pembukuan Koperasi.
- b. Dewan Pengawas Syariah
- 1) Melakukan pengawasan terhadap keseluruhan aspek organisasi dan usaha BMT sehingga benar-benar sesuai dengan prinsip syariah Islam.
 - 2) Memastikan produk dan jasa BMT sesuai dengan syariah.
 - 3) Memastikan tata laksana manajemen dan pelayanan sesuai dengan syariah.
 - 4) Terselenggaranya pembinaan anggota yang dapat mencerahkan dan membangun kesadaran bersama sehingga anggota siap dan konsisten bermuamalah secara Islam melalui wadah BMT.
- c. General Manajer
- 1) Menjabarkan kebijakan umum BMT yang telah dibuat pengurus dan disetujui rapat anggota.

- 2) Menyusun dan menghasilkan rancangan anggaran BMT dan rencana jangka pendek, rencana jangka panjang, serta proyeksi (*financial* atau *non financial*) kepada pengurus yang selanjutnya akan dibawa pada rapat anggota.
- 3) Menyetujui pembiayaan yang jumlahnya tidak melampaui batas wewenang manajemen.
- 4) Mengusulkan kepada pengurus tentang penambahan, pengangkatan, pemberhentian karyawan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan operasional BMT.
- 5) Mengelola dan mengawasi pengeluaran dan pemasukan biaya-biaya harian dan tercapainya target yang telah ditetapkan secara keseluruhan.
- 6) Mengamankan harta kekayaan BMT agar terlindungi dari bahaya kebakaran, pencurian, perampokan dan kerusakan, serta seluruh aset BMT.
- 7) Terselenggaranya penilaian prestasi kerja karyawan dan membuat laporan secara periodik kepada badan pengurus.
- 8) Menandatangani dan menyetujui permohonan pembiayaan dengan batas wewenang BMT.
- 9) Meningkatkan pendapatan dan menekan biaya serta mengawasi operasional BMT.

d. Pengawas

- a. Memberikan hasil penilaian mengenai kelayakan dan kecukupan pengendalian dibidang operasional, keuangan, bidang pembiayaan dan kegiatan BMT lainnya serta peningkatan efisiensi dan efektifitas pengendalian dengan biaya yang layak.
- b. Melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua kebijakan, ketentuan, rencana dan prosedur BMT yang telah benar-benar dijalankan dan dipatuhi.
- c. Melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua hak milik BMT telah dipertanggung jawabkan dan di jaga dari semua kerugian.
- d. Melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa data informasi yang disajikan kepada manajemen BMT dapat dipercaya.
- e. Melakukan penilaian mengenai kualitas pelaksanaan tugas setiap unit kerja dalam melaksanakan tanggung jawabnya.
- f. Memberikan rekomendasi mengenai perbaikan-perbaikan dibidang operasional, pembiayaan dan bidang lainnya.
- g. Melakukan koordinasi dengan bagian akuntansi/pembukuan dalam hal pengarsipan bukti nota debet/nota kredit, voucher, bilyet dan lain-lain yang berhubungan dengan transaksi harian.
- h. Membuat laporan yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan kegiatan diatas dan menyampaikannya kepada manajer BMT.

e. Manajemen Operasional

- 1) Terselenggaranya pelayanan yang memuaskan (*service excellence*) kepada mitra/anggota BMT.
- 2) Terevaluasi dan terselesaikannya seluruh permasalahan yang ada dalam BMT.
- 3) Terbitnya laporan keuangan, laporan perkembangan pembiayaan dan laporan mengenai penghimpunan dan secara lengkap, akurat dan sah baik harian, bulanan maupun sesuai dengan periode yang dibutuhkan.
- 4) Terarsipkannya surat masuk dan keluar serta notulasi rapat manajemen dan rapat operasional.
- 5) Terselenggaranya seluruh aktivitas rumah tangga BMT.
- 6) Terselenggaranya absensi kehadiran karyawan dan dokumentasi hasil penilaian seluruh karyawan serta pengajuan gaji.

f. Kepala Bagian Pembiayaan

- 1) Penyiapan administrasi pencairan pembiayaan (*dropping*).
- 2) Pengarsipan seluruh berkas pembiayaan.
- 3) Pengarsipan jaminan pembiayaan.
- 4) Penerimaan angsuran dan pelunasan pembiayaan.
- 5) Penyiapan kupon dan control terhadap kupon.
- 6) Pembuatan laporan pembiayaan sesuai dengan periode laporan.
- 7) Membuat laporan pembiayaan bulanan.

- 8) Membuat surat teguran dan peringatan kepada mitra yang akan dan telah jatuh tempo.
 - 9) Membuat surat perjanjian dengan pihak lain.
- g. Kepala Bagian Akuntansi
- 1) Pembuatan laporan keuangan
 - 2) Pengarsipan laporan keuangan dan berkas-berkas yang berkaitan secara langsung dengan keuangan.
 - 3) Menyediakan data-data yang dibutuhkan untuk kebutuhan analisis lembaga.
 - 4) Pengeluaran dan penyimpanan uang dari dan ke brankas (sebagai petugas alternatif/petugas pengganti).
- h. Teller
- 1) Mengelola fisik kas dan terjaganya keamanan kas.
 - 2) terselesainya laporan kas harian.
 - 3) Tersedianya laporan arus kas pada akhir bulan untuk keperluan evaluasi.
 - 4) Menerima setoran dan penarikan tabungan.
- i. Staf Penagihan
- 1) Memastikan angsuran yang harus dijemput telah ditagih sesuai dengan waktunya.
 - 2) Memastikan tidak ada selisih antara dana yang dijemput dengan dana yang disetorkan ke BMT.

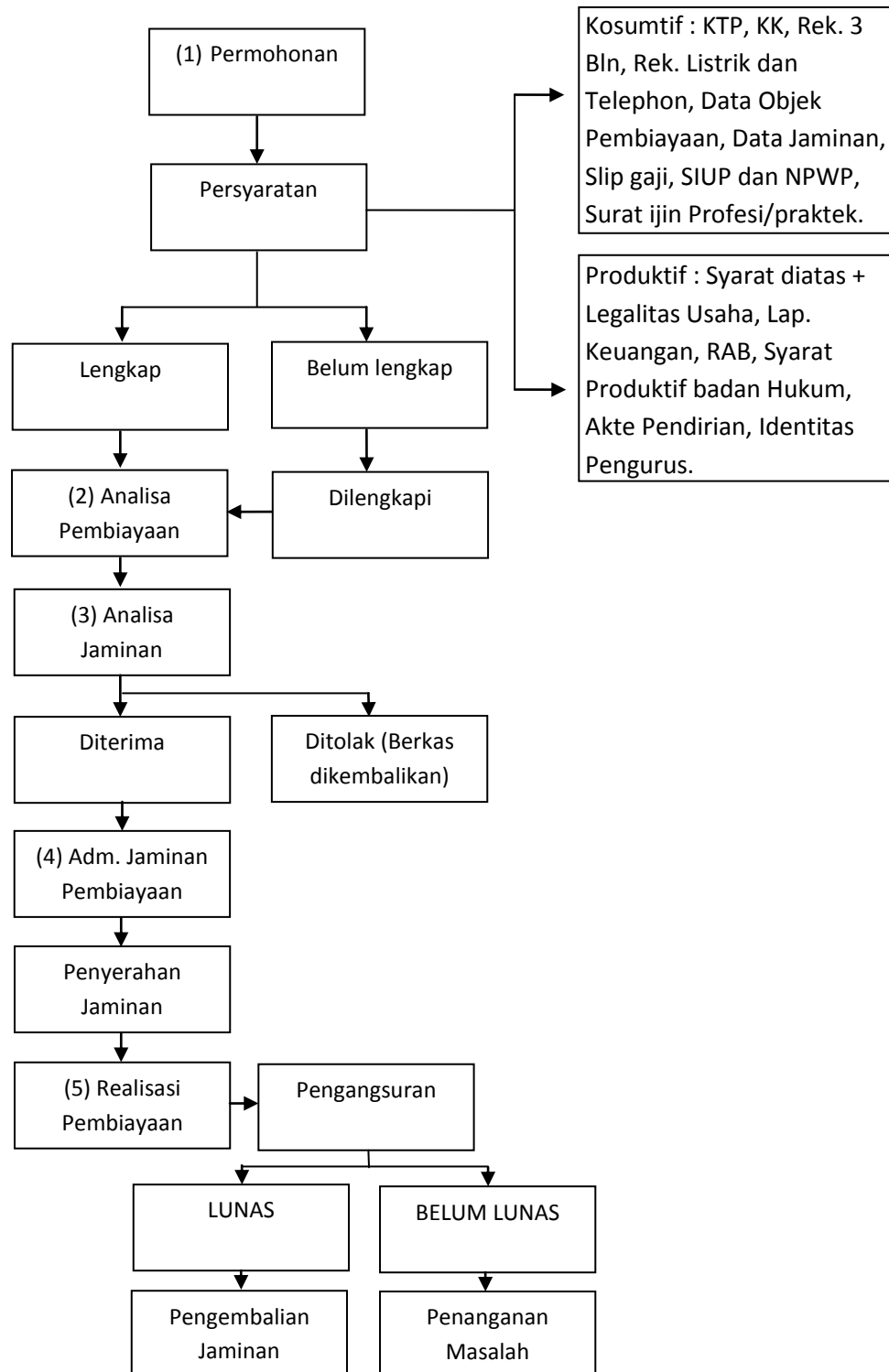
- 3) Membantu memberikan jalan keluar dan solusi bagi mitra usaha yang bermasalah, melakukan penjualan jaminan, dan upaya-upaya lainnya baik secara kekeluargaan maupun hukum yang berlaku.

B. Prosedur Pembiayaan KJKS BMT Arafah

Pembiayaan merupakan bentuk dari muamalah BMT yang merupakan proses penyaluran dana. Tentunya penyaluran dana tersebut kepada pihak-pihak yang membutuhkan, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif. Bersifat konsumtif merupakan pembiayaan yang dipergunakan untuk keperluan di luar sektor usaha atau untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, misalnya pembiayaan *murabahah* untuk pembelian sepeda motor. Sedangkan bersifat produktif merupakan pembiayaan untuk keperluan produksi dalam arti luas, artinya sebagai pembiayaan yang dipakai untuk keperluan usaha, baik untuk modal awal maupun peningkatan berbagai jenis usaha yang bergerak pada berbagai sektor usaha yang tidak melanggar ketentuan syar'i.

Sebagian dari masyarakat luas belum memahami secara betul prosedur pembiayaan dalam BMT. Sehingga dari minimnya informasi tentang prosedur pembiayaan, masyarakat lebih bersifat masa bodoh dan tidak berkeinginan untuk lebih mengerti prosedur pembiayaan tersebut. Untuk memahami prosedur dari pada pembiayaan, maka secara khusus penulis menyajikan pembahasan prosedur pembiayaan pada KJKS BMT Arafah. Ada beberapa prosedur atau tahapan dalam pembiayaan yang diberikan BMT Arafah, yaitu:

Prosedur pembiayaan dalam bentuk gambar dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 3. 2
Prosedur Pembiayaan

Keterangan Gambar 3. 2 :

1. Permohonan Pembiayaan

a. Tujuan

Menstandarisasikan prosedur pengajuan pembiayaan di BMT Arafah.

b. Ruang Lingkup

Proses pemberian informasi kepada calon anggota pembiayaan sampai dengan penyerahan berkas lengkap pembiayaan kepada administrator pembiayaan.

c. Definisi pihak yang terkait dengan pembiayaan

- 1) Anggota pembiayaan : Anggota pembiayaan merupakan Anggota BMT yang telah mendapatkan fasilitas pembiayaan dari BMT.
- 2) Customer service : Staff BMT ARAFAH yang mempunyai tugas untuk melayani anggota BMT ARAFAH mengenai informasi produk-produk pelayanan BMT ARAFAH dan menolong anggota BMT ARAFAH bila ada pertanyaan-pertanyaan ataupun kesulitan yang berkaitan dengan BMT ARAFAH.
- 3) Administrator pembiayaan : Staff BMT ARAFAH yang bertugas mengurus semua proses pembiayaan yang telah melengkapi syarat administrasi. Ruang lingkup kerja dari proses analisis pembiayaan, pencairan, monitoring, pengurusan sampai dengan pelepasan jaminan.

d. Prosedur Uraian Aktivitas

- 1) CS menjelaskan produk pembiayaan di BMT ARAFAH kepada anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan. Pemohon harus sudah menjadi anggota dan telah memiliki simpanan tabungan minimal Rp.10.000,- atau simpanan berjangka dengan nominal minimal Rp.5.000.000,- di BMT ARAFAH. Bila belum menjadi anggota simpanan maka dipersilahkan untuk mengisi formulir anggota dan formulir permohonan pembukaan simpanan tabungan/simpanan berjangka.
- 2) Anggota mengisi dan melengkapi form permohonan pembiayaan dan menyiapkan persyaratan lainnya. Syarat permohonan individu (konsumtif):
 - a) KTP suami istri/passport.
 - b) Kartu keluarga, surat nikah.
 - c) Salinan rekening bank/BMT ARAFAH 3 bulan terakhir (optional).
 - d) Salinan tagihan rekening listrik dan telepon (optional).
 - e) Data objek pembiayaan.
 - f) Data jaminan (harga objek).

Tambahan:

- a) PNS/Karyawan/ABRI dll : Slip gaji terakhir, surat referensi kantor atau SK pengangkatan.
- b) Pengusaha Perorangan : SIUP dan NPWP (optional).

- c) Profesional (dokter, pengacara dll : surat ijin profesi, surat ijin praktek.

Syarat pembiayaan produktif perorangan: Syarat konsumtif di atas ditambah dengan:

- a) Legalitas usaha.
- b) Laporan keuangan dua tahun terakhir (optional).
- c) Past performance 1 tahun terakhir.
- d) Bisnis plan / RAB.
- e) Syarat produktif badan hukum.

Syarat di atas ditambah dengan:

- f) Akte pendirian (optional).
- g) Legalitas (optional).
- h) Identitas pengurus (optional).

- 3) CS meminta form permohonan pembiayaan dan melayani , memeriksa persyaratan kelengkapannya (CS mengembalikan form permohonan pembiayaan apabila belum lengkap pengisian dan kelengkapan persyaratannya).
- 4) CS menjelaskan dan menegaskan produk pembiayaan yang dipilih berikut jangka waktu dan cara pengembaliannya. CS mensimulasikan Kartu Angsuran sesuai dengan pembiayaan yang dipilih oleh anggota dengan menggunakan sistem.
- 5) CS mengirimkan form yang telah lengkap ke bagian administrator pembiayaan.

- 6) Administrator pembiayaan akan mempersiapkan berkas untuk di proses lebih lanjut ke analisis pembiayaan dan komite pembiayaan.
- 7) Administrator pembiayaan menerima dan memeriksa ulang kelengkapan pengisian dan persyaratan, Map pembiayaan dikembalikan ke CS jika belum lengkap secara administrasi.

2. Analisa Pembiayaan

a. Tujuan

Standarisasi pelaksanaan teknis proses analisa pembiayaan di BMT ARAFAH.

b. Ruang Lingkup

Proses kegiatan dari mulai mendapatkan tugas analisa/informasi tentang peluang pembiayaan sampai dengan persiapan berkas analisa ke komite pembiayaan.

c. Definisi pihak yang terkait dengan pembiayaan

- 1) Anggota Pembiayaan : Nasabah pembiayaan merupakan nasabah BMT ARAFAH yang telah mendapatkan fasilitas pembiayaan dari BMT ARAFAH.
- 2) Administrator Pembiayaan : Staff BMT ARAFAH yang bertugas mengurus semua proses pembiayaan yang telah melengkapi syarat administrasi. Ruang lingkup kerja dari

proses analisis pembiayaan, pencairan, monitoring, pengurusan sampai dengan pelepasan jaminan.

- 3) Manajer Marketing : Adalah manajer di BMT ARAFAH yang mengurus masalah marketing dari operasional BMT ARAFAH baik yang berupa marketing pendanaan dan juga marketing untuk masalah pembiayaan. Manajer marketing tidak termasuk dalam komite pembiayaan yang berwenang untuk menyetujui proses dari pembiayaan yang diajukan oleh nasabah pembiayaan.

d. Prosedur Uraian Aktivitas

- 1) Proses *Inisiasi*

Merupakan analisa awal untuk penentuan calon anggota yang potensial. Anggota potensial berasal dari anggota pembiayaan yang sudah mengajukan permohonan. Petugas Koperasi yang melihat usaha-usaha anggota yang potensial untuk dikembangkan. Informasi anggota potensial diperoleh dari pengecekan *interen* dari *profile* database anggota BMT ARAFAH di system yang telah diisi ketika permohonan, maupun dari data *extern* seperti : referensi, *customer* anggota maupun *supplier*.

- 2) Proses *Solitasi*

Kunjungan ke usaha calon anggota pembiayaan (anggota potensial). Informasi yang dikumpulkan adalah Data usaha,

filosofi usaha, sasaran yang ingin dicapai, rencana jangka pendek, menengah dan panjang, para pendiri, pemegang saham, jumlah karyawan, kemampuan membayar, barang yang akan dipinjamkan, pembuatan laporan hasil survey.

3) Persiapan Analisa

Pengumpulan informasi untuk persiapan analisa, baik yang bersifat umum (reputasi, data ekonomi proyek), maupun data yang bersifat khusus (yuridis, keuangan, teknis manajemen). Penerapan titik kritis proyek yang dibiayai. Merupakan penentuan aspek mana yang paling kritis untuk analisa yang merupakan faktor dominan untuk keberhasilan proyek.

4) Analisa setiap aspek

Setelah mengetahui titik kritis, maka analisa dapat dilanjutkan ke setiap aspek calon debitur seperti aspek :

(a) Aspek yuridis

Status badan usaha dan kapasitas calon pembiayaan secara hukum.

(b) Aspek pemasaran

Siklus hidup produksi, produk substitusi, kompetitor, daya beli masyarakat, program promosi, daerah pemasaran, faktor musim, manajemen pemasaran, kontrak penjualan.

(c) Aspek teknis

Lokasi usaha, fasilitas, mesin-mesin, proses produksi efisiensi.

(d) Aspek jaminan

Untuk mengetahui nilai ekonomis jaminan dan nilai yuridis dari barang yang dijaminkan.

5) Analisa Kualitatif

Analisa kualitatif menekankan kepada aspek kemauan membayar dari nasabah. Hal ini mencakup karakter/watak dan komitmen dari nasabah BMT ARAFAH.

6) Analisa Kuantitatif

Merupakan analisa untuk menilai kemampuan membayar dari calon debitur. Pendekatan yang dipakai ialah:

(a) Pendekatan pendapatan bersih.

(b) Pendekatan kemampuan menabung.

(c) Pendekatan kebutuhan modal.

(d) Penjelasan tentang masing-masing pendekatan dapat dilihat pada bagian kebijakan pembiayaan.

3. Analisa Jaminan

a. Tujuan

Standarisasi pelaksanaan teknis proses analisa jaminan pembiayaan di BMT ARAFAH.

b. Ruang Lingkup

Proses kegiatan mendapatkan kelengkapan berkas pembiayaan sampai dengan penyerahan jaminan pada proses pencairan pembiayaan.

c. Definisi pihak yang terkait dengan pembiayaan

- 1) Anggota pembiayaan : Anggota pembiayaan merupakan anggota BMT ARAFAH yang telah mendapatkan fasilitas pembiayaan dari BMT ARAFAH.
- 2) Administrator Pembiayaan : Staff BMT ARAFAH yang bertugas mengurus semua proses pembiayaan yang telah melengkapi syarat administrasi. Ruang lingkup kerja dari proses analisis pembiayaan, pencairan, monitoring, pengurusan sampai dengan pelepasan jaminan.
- 3) Manajer Marketing : Adalah manajer di BMT ARAFAH yang mengurus masalah marketing dari operasional BMT ARAFAH baik yang berupa marketing pendanaan dan juga marketing untuk masalah pembiayaan. Manajer marketing tidak termasuk dalam komite pembiayaan yang berwenang untuk menyetujui proses dari pembiayaan yang diajukan oleh nasabah pembiayaan.
- 4) Surveyor : Staff BMT ARAFAH yang bertugas mengecek, mencari data serta melakukan taksiran awal mengenai penjelasan-penjelasan yang ada pada data permohonan

pembiayaan. Surveyor juga melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk melihat secara fisik data-data yang diperlukan.

d. Prosedur Uraian Aktivitas

- 1) Setelah melakukan pengecekan terhadap kelengkapan syarat administrasi, berkas pembiayaan akan di berikan oleh Administrator pembiayaan kepada surveyor, untuk dilakukan pengecekan, termasuk pula analisa dan pengecekan masalah fisik jaminan.
- 2) Surveyor meneliti dan mempelajari kelengkapan dan kebenaran/keabsahan dokumen jaminan yang diserahkan oleh calon nasabah pembiayaan.
- 3) Surveyor melakukan peninjauan setempat (*on the spot*) untuk mengetahui dan menilai keadaan fisik barang-barang yang akan dijaminakan, apakah sesuai dengan yang tercantum dalam berkas-berkas dokumen yang ada dan penjelasan lain dari calon nasabah pembiayaan.
- 4) Dibuatkan berita acara pemeriksaan/penaksiran barang jaminan yang merupakan bagian dari lampiran dan laporan kunjungan kepada nasabah pembiayaan yang harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- 5) Surveyor melakukan penilaian batas jaminan dasar penilaian secara umum adalah :

(a) Harga Buku

Artinya harga yang dibeli dikurangi jumlah penghapusan yang pernah dilakukan terhadap barang tersebut.

(b) Harga Pasar

Nilai barang tersebut bisa di jual pada saat pelaksanaan penilaian/taksiran.

6) Pengikatan (*optional*) terhadap barang-barang yang diterima sebagai jaminan pembiayaan harus dilaksanakan secara hukum/yuridis. Pengikatan atas barang-barang jaminan dilaksanakan setelah perjanjian pembiayaan ditanda tangani, mengingat perjanjian pembiayaan merupakan perjanjian pokok dari perjanjian peningkatan barang-barang jaminan.

7) Penguasaan atas jaminan. Penguasaan atas barang-barang jaminan adalah dengan cara menguasai bukti kepemilikan atas barang tersebut. Dokumen-dokumen yang harus dikuasai oleh BMT ARAFAH adalah :

(a) Sertifikat hak dan BPKB.

(b) Sertifikat tanah dan izin bangun.

(c) Surat kuasa nota riil dari pemilik kepada debitur ataupun langsung kepada BMT ARAFAH bila barang-barang jaminan tersebut bukan milik debitur.

(d) *Invoice* atas barang-barang yang dijaminkan, apabila barang tersebut adalah barang yang dijaminkan adalah peralatan pabrik.

4. Administrasi Jaminan Pembiayaan

a. Tujuan

Standarisasi pelaksanaan teknis proses pencatatan penyerahan jaminan oleh debitur ke BMT ARAFAH dan penyerahan jaminan kembali ke anggota setelah pelunasan pembiayaan.

b. Ruang Lingkup

Proses kegiatan dari penyerahan jaminan beserta administrasinya dan penyerahan jaminan kembali ke anggota setelah pelunasan pembiayaan.

c. Definisi pihak yang terkait dengan pembiayaan

1) Anggota pembiayaan : Merupakan anggota BMT ARAFAH yang telah mendapatkan fasilitas pembiayaan dari BMT ARAFAH.

2) Administrator Pembiayaan : Staff BMT ARAFAH yang bertugas mengurus semua proses pembiayaan yang telah melengkapi syarat administrasi. Ruang lingkup kerja dari proses analisis pembiayaan, pencairan, monitoring, pengurusan sampai dengan pelepasan jaminan.

- 3) Manajer Marketing : Adalah manajer di BMT ARAFAH yang mengurus masalah marketing dari operasional BMT ARAFAH baik yang berupa marketing pendanaan dan juga marketing untuk masalah pembiayaan. Manajer marketing tidak termasuk dalam komite pembiayaan yang berwenang untuk menyetujui proses dari pembiayaan yang diajukan oleh anggota pembiayaan.

d. Prosedur Uraian Aktivitas

1) Penyerahan Jaminan

- (a) Anggota pembiayaan yang telah menandatangani akad pembiayaan, sebelum melakukan pencairan pembiayaan, terlebih dahulu menyerahkan jaminan yang asli kepada bagian administrasi pembiayaan untuk di arsipkan.
- (b) Mencatat jaminan anggota pembiayaan dalam buku jaminan, memasukkan dalam amplop jaminan kemudian membubuhkan nomor urut jaminan sesuai dengan nomor urut yang tertera di buku jaminan.
- (c) Membuat bukti serah terima jaminan sebagai bukti penerimaan jaminan oleh BMT ARAFAH yang kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (d) Mengupdate data jaminan pada BMT *Online*.
- (e) Mengarsipkan bukti serah terima jaminan beserta jaminan ke dalam lemari jaminan.

2) Pengembalian Jaminan

- (a) Setelah mengurus pelunasan pembiayaan, anggota pembiayaan menyerahkan kuitansi pembiayaan yang sudah dibubuhi cap LUNAS kepada administrator pembiayaan untuk mengambil jaminan.
- (b) Mencari jaminan debitur pada arsip internal berdasarkan nomor urut yang tertera pada buku jaminan.
- (c) Mencatat tanggal penyerahan jaminan pada buku jaminan, mencocokkan dengan data yang ada pada buku jaminan dengan jaminan. Jika cocok kemudian memintakan tanda tangan anggota pembiayaan sebagai bukti jaminan tersebut telah di ambil.
- (d) *Update* status jaminan pada sistem.
- (e) Membuat tanda terima pengambilan jaminan oleh anggota. Kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak, diserahkan kepada anggota dan diarsipkan.
- (f) Menyerahkan jaminan kepada anggota pembiayaan.

5. Realisasi Pembiayaan

a. Tujuan

Menstandarisasikan pelaksanaan proses realisasi pembiayaan.

b. Ruang Lingkup

Proses data lengkap pembiayaan masuk ke komite pembiayaan sampai dengan proses pencairan pembiayaan oleh anggota.

c. Definisi pihak yang terkait dengan pembiayaan

- 1) Anggota pembiayaan : Merupakan anggota BMT yang telah mendapatkan fasilitas pembiayaan dari BMT.
- 2) Administrator Pembiayaan : Staff BMT yang bertugas mengurus semua proses pembiayaan yang telah melengkapi syarat administrasi. Ruang lingkup kerja dari proses analisis pembiayaan, pencairan, monitoring, pengurusan sampai dengan pelepasan jaminan.
- 3) Manajer Marketing : Adalah manajer di BMT yang mengurus masalah marketing dari operasional BMT baik yang berupa marketing pendanaan dan juga marketing untuk masalah pembiayaan. Manajer marketing tidak termasuk dalam komite pembiayaan yang berwenang untuk menyetujui proses dari pembiayaan yang diajukan oleh anggota pembiayaan.
- 4) komite Pembiayaan : Adalah suatu lembaga yang berwenang untuk memberikan persetujuan suatu permohonan fasilitas pembiayaan dari anggota/calon anggota.
- 5) Teller : Adalah staff BMT yang bertugas melakukan pelayanan transaksi uang tunai di BMT.

d. Prosedur Uraian Aktivitas

- 1) Administrator pembiayaan menyerahkan berkas hasil survey, dan dokumen-dokumen pembiayaan kepada komite pembiayaan.
- 2) Komite pembiayaan mengadakan rapat untuk memutuskan status dari permohonan tersebut dengan mempergunakan data hasil survey dan perhitungan analisa pembiayaan.
- 3) Jika ditolak atau ditangguhkan, komite pembiayaan akan membubuhkan tanda tangan pada kolom penolakan di dalam lembar persetujuan komite dan memberikan surat jawaban penolakan yang dibuat oleh administrasi pembiayaan.
- 4) Jika disetujui, anggota komite pembiayaan membubuhkan tanda tangan pada kolom persetujuan di dalam lembar persetujuan komite.
- 5) Pada permohonan pembiayaan yang disetujui, calon anggota pembiayaan diminta melengkapi : Kuasa debet rekening (KDR), aplikasi asuransi pembiayaan, serta menyerahkan kepada *costumer service*.
- 6) Manajer marketing/analisis pembiayaan melakukan kalkulasi kebutuhan pembiayaan berdasarkan data-data survey yang telah dipunyai.

- 7) Berkas lengkap berikut persetujuan dan hasil kalkulasi kebutuhan pembiayaan diberikan kepada administrator pembiayaan untuk di proses lebih lanjut.
- 8) Berkas lengkap berikut persetujuan dan hasil kalkulasi kebutuhan pembiayaan diberikan kepada administrator pembiayaan untuk di proses lebih lanjut.
- 9) Administrator pembiayaan melengkapi data pembiayaan dan kartu pembiayaan pada sistem dan merubah status kartu dari PENGAJUAN menjadi DISETUJUI.
- 10) Administrator pembiayaan membuat slip realisasi pembiayaan sejumlah pembiayaan yang telah disetujui dan slip setoran biaya administrasi dan materai.
- 11) Akad pembiayaan yang ditanda tangani oleh pimpinan BMT dan anggota pembiayaan. Untuk pembiayaan diatas 5 juta harus melibatkan pengurus untuk penanda tanganannya.
- 12) Administrator pembiayaan melakukan transaksi realisasi pada BMT online dan merubah status kartu menjadi DICAIRKAN.
- 13) Teller meminta slip : setoran pembiayaan, biaya administrasi dan materai. Teller memasukkan dana realisasi pembiayaan ke dalam rekening tabungan anggota saldo anggota telah *di update*, dan telah bertambah sesuai jumlah nominal pembiayaan yang disetujui.

- 14) Anggota menarik dana pembiayaan melalui *teller* melalui slip penarikan (Proses penarikan tabungan seperti biasa).
- 15) Pembuatan kartu pembiayaan.
- 16) Administrasi pembiayaan mengarsipkan semua dokumen pembiayaan.

C. Tahapan Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu hal yang tidak di inginkan oleh lembaga keuangan manapun termasuk BMT. Pembiayaan bermasalah terjadi ketika anggota pembiayaan mengingkari janji untuk membayar angsuran pembiayaan atau membayar seluruh utang pembiayaan beserta bagi hasil pada saat jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah terjadi dikarenakan kesulitan keuangan yang dihadapi oleh anggota pembiayaan. Faktor tersebut adalah:

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri.

Faktor internal lain yang mempengaruhi antara lain:

- a. Peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut.
- b. Manajemen kurang baik atau kurang rapi serta kurang cakap.
- c. Laporan keuangan tidak lengkap.
- d. Perencanaan kurang matang.

- e. Dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut.

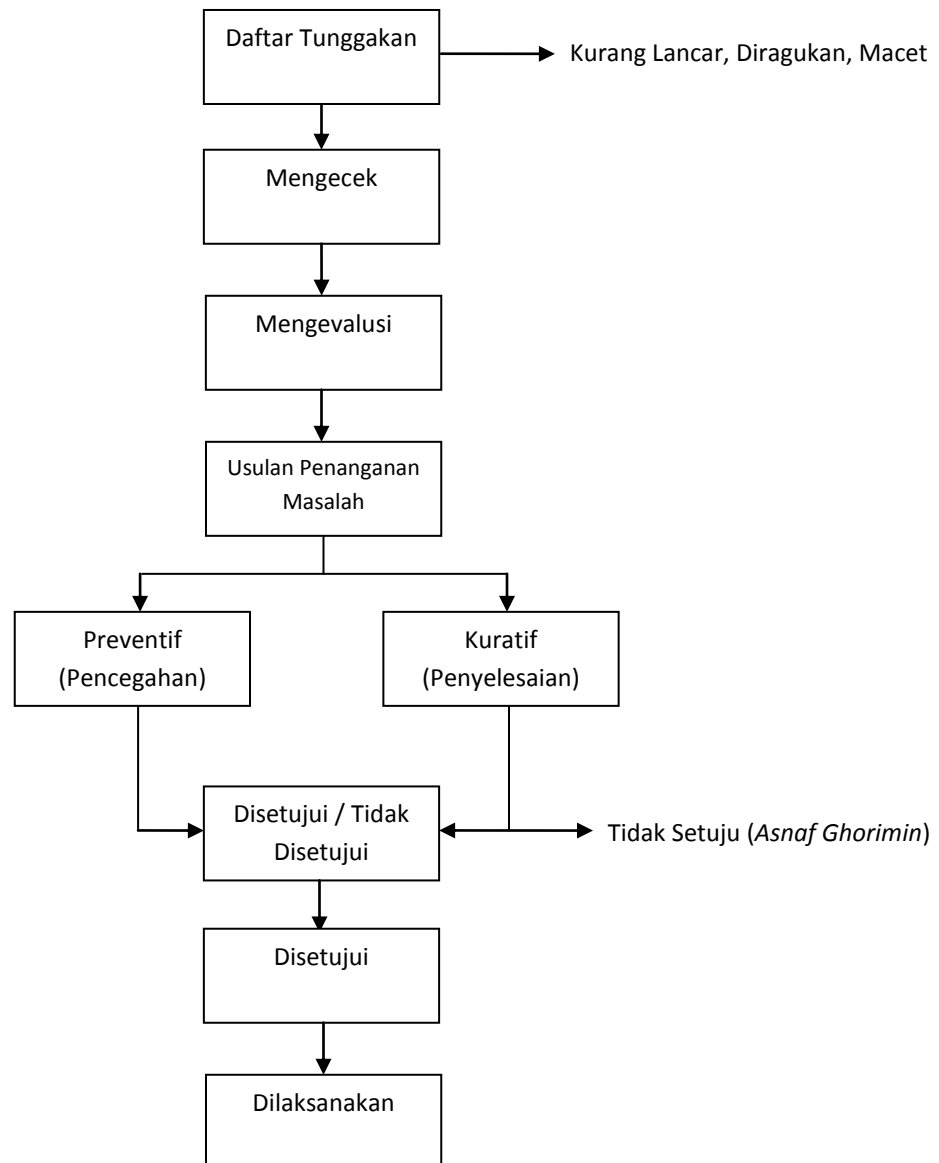
2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, antara lain:

- a. Aspek pasar kurang mendukung.
- b. Kemampuan daya beli masyarakat kurang.
- c. Kebijakan pemerintah.
- d. Karena adanya faktor lain di luar usaha, misalnya kenakalan peminjam.

Untuk memahami prosedur penanganan pembiayaan bermasalah, penulis akan menyajikan tahapan-tahapan yang dilakukan BMT Arafah dalam menangani pembiayaan bermasalah, antara lain:

Dalam bentuk gambar dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 3. 3
Prosedur Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Keterangan Gambar 3. 3 :

1. Tujuan

Standarisasi pelaksanaan proses penyelesaian pembiayaan bermasalah.

2. Ruang Lingkup

Proses indikasi masalah sampai dengan pembuatan penyelesaian masalah.

3. Definisi pihak yang terkait dengan penanganan pembiayaan bermasalah

- a. Anggota pembiayaan : Merupakan anggota BMT ARAFAH yang telah mendapatkan fasilitas pembiayaan dari BMT ARAFAH.
- b. Administrator Pembiayaan : Staff BMT ARAFAH yang bertugas mengurus semua proses pembiayaan yang telah melengkapi syarat administrasi. Ruang lingkup kerja dari proses analisis pembiayaan, pencairan, monitoring, pengurusan sampai dengan pelepasan jaminan.
- c. Manajer Marketing : Adalah manajer di BMT ARAFAH yang mengurus masalah marketing dari operasional BMT ARAFAH baik yang berupa marketing pendanaan dan juga marketing untuk masalah pembiayaan. Manajer marketing tidak termasuk dalam komite pembiayaan yang berwenang untuk menyetujui proses dari pembiayaan yang diajukan oleh anggota pembiayaan.
- d. Komite Pembiayaan : Adalah suatu lembaga yang berwenang untuk memberikan persetujuan suatu permohonan fasilitas pembiayaan dari anggota/calon anggota.

4. Prosedur uraian aktivitas

- a. Penyiapan daftar tunggakan yang dihasilkan oleh bagian administrasi pembiayaan digolongkan berdasarkan kriteria:

- 1) Lancar adalah anggota yang membayar angsuran kurang dari 31 hari.
 - 2) Dalam Perhatian Khusus adalah anggota membayar angsuran antara 32 – 93 hari setelah jatuh tempo.
 - 3) Kurang Lancar adalah anggota yang membayar angsurannya antara 94 – 186 hari setelah jatuh tempo.
 - 4) Diragukan adalah anggota yang membayar angsurannya antara 187 – 279 hari setelah jatuh tempo.
 - 5) Macet adalah anggota yang mengalami keterlambatan angsuran diatas 280 hari.
- b. Marketing manajer mengecek dan *mereview* anggota pembiayaan yang telah masuk kelompok kurang lancar, diragukan dan macet.
 - c. Memverifikasi tunggakan, menganalisa, mengevaluasi *mereview* atau mengadakan kunjungan usaha dari anggota yang kolektibilitasnya kurang lancar, diragukan dan macet.
 - d. Berdasarkan hasil kunjungan usaha, marketing manajer membuat laporan kunjungan usaha dan *financial review*.
 - e. Membuat usulan penyelesaian pembiayaan bermasalah berdasarkan laporan kunjungan usaha dan hasil *financial review* dari usaha anggota. Dalam usulan tersebut marketing manajer merekomendasikan menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan penyehatan melalui *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* atau dalam penyelesaian pembiayaan secara *litigasi* dan *non*

litigasi. Dalam hal ini terdapat dua penanganan yaitu penanganan yang bersifat *preventif* (pencegahan) dan *kuratif* (penyelesaian).

a. *Preventif* (pencegahan)

1) *Rescheduling*

Adalah penjadwalan kembali fasilitas pembiayaan yang biasanya disertai perpanjangan jangka waktu pengembalian hutang pembiayaan, dan atau penurunan angsuran pembiayaan.

2) *Reconditioning*

Adalah peninjauan kembali atas persyaratan pembiayaan tertentu, misalnya dengan dana sendiri harus berupa uang segar (*fresh money*), diubah menjadi jaminan yang tersedia diperhitungkan sebagai dana sendiri.

3) *Restructuring*

Adalah menilai kemampuan perusahaan membayar kembali pembiayaan serta menilai kemampuan perusahaan dalam menanggung rugi.

b. *Kuratif* (penyelesaian)

a) *Sulhu*

Adalah akad untuk menyelesaikan suatu masalah atau penyelesaian sehingga menjadi perdamaian, dengan cara

melakukan *sulh* (keringanan) tanpa penyelesaian melalui jalur hukum.

b) *Ibra'*

Adalah suatu cara menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan melepaskan, mengikhlaskan, atau menghapuskan hutang seseorang oleh pemberi hutang.

c) *Hajr*

Adalah suatu cara menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan menunda seseorang untuk menggunakan atau memanfaatkan sendiri hartanya.

- f. Memeriksa, mempertimbangkan usulan penyelesaian pembiayaan bermasalah dan mengambil keputusan untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah.
- g. Jika komite pembiayaan menyetujui usulan penyehatan, maka marketing manager akan membuat surat persetujuan prinsip tentang persetujuan *rescheduling*, *restructuring* atau *reconditioning*.
- h. Jika komite tidak setuju penyehatan maka dilakukan penyelesaian melalui litigasi/non litigasi atau dikelompokkan dalam *asnaf ghorimin* pada anggota.
- i. Mengirimkan surat persetujuan prinsip tentang persetujuan *rescheduling/restructuring* atau *reconditioning* ke anggota.
- j. Apabila anggota menyetujui *offering letter* tersebut, maka berlanjut ke prosedur pengikatan.

- k. Apabila anggota tidak setuju, maka marketing manager akan melaporkan kondisi tersebut ke komite pembiayaan untuk pengambilan keputusan.
- l. Melakukan *monitoring* terhadap hasil kegiatan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab ini merupakan bab terakhir yang penulis paparkan terkait dengan prosedur pembiayaan dan penanganan masalah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Arafah Sukoharjo yang telah penulis sajikan, maka dari uraian diatas tersebut dapat penulis simpulkan diantaranya adalah:

1. BMT Arafah merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang berbadan hukum koperasi. Dalam hal ini, BMT Arafah memiliki kegiatan seperti halnya lembaga keuangan yang lainnya yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana dan penanganan masalah. Terkait dengan penyaluran dana, BMT Arafah menerapkan beberapa akad pembiayaan diantaranya; prinsip jual beli (*Murabahah, Salam, Istisna'*), prinsip sewa beli (*Ijarah Muntahiyah Bittamlik*), prinsip bagi hasil (*Musyarakah, Mudharabah*), dan sebagainya. Sehingga dalam hal ini ada beberapa prosedur dalam pembiayaan yang diberikan oleh BMT Arafah, yaitu; Permohonan pembiayaan, Analisa Pembiayaan, Analisa Jaminan, Administrasi Jaminan Pembiayaan, dan Realisasi Pembiayaan.
2. Penanganan pembiayaan bermasalah dalam pemberian pembiayaan oleh BMT Arafah sangatlah penting. Walaupun pembiayaan bermasalah merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh lembaga keuangan manapun, akan tetapi penanganan masalah merupakan suatu proses

yang harus dilakukan ketika anggota pembiayaan mengingkari janji untuk membayar angsuran setelah jatuh tempo. Sehingga dalam menangani pembiayaan bermasalah, BMT Arafah menerapkan 2 prinsip, yaitu yang bersifat *preventif* (pencegahan) yang meliputi *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring*. dan *kuratif* (penyelesaian) yang meliputi *Sulhu*, *Ibra'*, dan *Hajr*.

B. Saran

1. Membuat SOP (Standar Operasional Prosedur) yang lebih mudah dipahami mengenai prosedur pembiayaan dan prosedur penanganan pembiayaan bermasalah agar mudah dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Membuat SOP dengan alur gambar atau diagram (*structural*) untuk mempermudah dalam pemahaman dan lebih efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Anshori, H. Abdul Ghofur. *Payung Hukum Perbankan Syariah (UU di Bidang Perbankan, Fatwa. DSN. MUI, dan Peraturan Bank Indonesia)*. Yogyakarta: UII Pres, 2007.

M. Nadratuzzaman Hosen, dkk. *Materi Dakwah Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PKES Publishing, 2008).

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor: 91/Kep/M. KUKM/IX/2004, *Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Negara Koperasi dan UKM, 2006).

Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI, *Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Negara Koperasi dan UKM, 2007).

Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1995, *Kegiatan Usaha Simpan Pinjam*, (Sukoharjo: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal, 2008).

Tim Penulis P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2008).

www.republikaonline.com : 14/12/01. 12.15 WIB

www.hidayatullah.com : 15/10/04. 22.50 WIB

www.BMTLINK.com : 14/10/02. 112.40 WIB

www.pikiranrakyat.com



Fakultas Ekonomi
Universitas Sebelas Maret Surakarta
PROGRAM STUDI D3
KEUANGAN DAN PERBANKAN

Jl. Ir. Sutami No. 36 A Kentingan Surakarta 57126 Telp. (0271) 647481 Faks. (0271) 638484

FORMULIR KONFIRMASI MAGANG KERJA

No: _____

A. DATA MAHASISWA

1. Nama	: YUSUF AZIZ RAHMA
2. NIM	: F 3607103
3. Tempat/tgl. Lahir	: WONOGIRI / 10 MEI 1989
4. Alamat Rumah	: WONOREJO RT 04 / III POLOKARTO SKH
Kode Pos	: 57555
No. Telepon/fp	: 085641441945
5. Alamat tinggal/kost	: WONOREJO RT 04 / III POLOKARTO SKH
No. Telepon	: 085641441945
6. Jumlah SKS yang dicapai	: 104 SKS
7. IP Kumulatif	: 3,49

B. TEMPAT MAGANG

1. Nama Instansi	: KJKS BMT AROFAH
2. Alamat Instansi	: Jl. Lurik No. 17 Nguri Cemari Grogol Sukoharjo
No. Telepon/Fax	: (0271) 2050410 / (0271) 726452
3. Jenis/Bidang Instansi	: KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH
4. Nama Pemilik/Pengurus	: Krishna Adityangga, SEI, M.Si (Ketua Pengurus)
5. Bidang/Departemen	: KOPERASI / DINAS KOPERASI DAN UMKM
6. Surat Instansi Nomor	: 14140/BH/KDK.11/IX/2007

Dengan ini saya akan melaksanakan Program Magang Kerja sebagai prasyarat Penulisan Tugas Akhir dan sanggup untuk menjunjung tinggi ailmater dan mentaati tata tertib tempat magang.



Surakarta, 20 FEBRUARI
2010

(Signature)
YUSUF AZIZ RAHMA
NIM F 3607103

Keterangan:

- B1. Lembar Putih : Mahasiswa
B2. Lembar Kuning : Dosen Pembimbing Magang Kerja
B3. Lembar Hijau : Instansi Tempat Magang
B4. Lembar Merah : Prodi/ Arsip

Lampiran 2

SURAT KETERANGAN

No. 024 /SK - P / BMT - AEF /W/ / 2010

Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Arafah Sukoharjo dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : YUSUF AZIZ RAHMA
NIM : F 3607103
Fakultas : Ekonomi
Prodi : Diploma III Keuangan dan Perbankan
Universitas Sebelas Maret Surakarta

Telah melaksanakan Praktik Magang Kerja di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Arafah Sukoharjo mulai tanggal 1 Maret 2010 s/d 31 Maret 2010.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagai semestinya.

Sukoharjo, Juni 2010

Koperasi Jasa Keuangan Syariah

BMT Arafah Sukoharjo.

Mengetahui,

General Manager


Jujur, Amanah, Profesional
Badan Hukum : 1614058490001.002007
Rakhmat Setyawan, A. Md.

Lampiran 3

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan, di bawah ini :

Nama : YUSUF AZIZ RAHMA
NIM : F 3607103
Fakultas : EKONOMI
Program studi : DIPLOMA III KEUANGAN DAN PERBANKAN
Tempat Tanggal Lahir : WONOGIRI, 10 MEI 1989
Alamat Rumah : JL. KH AHMAD DAHLAN 154 WONOREJO RT
04 / III POLOKARTO SUKOHARJO
No Telepon : 085641441945
Judul Tugas Akhir : **PROSEDUR PEMBIAYAAN DAN
PENANGANAN MASALAH PADA KJKS
BMT ARAFAH SUKOHARJO**

Pembimbing Tugas Akhir: Izza Mafruhah, SE, M.Si

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir ini merupakan hasil karya asli penulis sendiri.
2. Apabila ternyata dikemudian hari diketahui bahwa Tugas Akhir yang penulis susun tersebut terbukti merupakan hasil jiplakan/salinan/saduran karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berupa:
 - a. Sebelum dinyatakan "LULUS" :
 - * Menyusun ulang Tugas Akhir dan diuji ulang kembali.
 - b. Setelah dinyatakan "LULUS":
 - * Pencabutan gelar dan penarikan ijazah kesarjanaan yang telah diperoleh.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Surakarta, Juni 2010



Yang Menyatakan

YUSUF AZIZ RAHMA
NIM F 3607103

Lampiran 4

BMT ARAFAH

Jujur, Amanah, Profesional

Jl. Lurik No.17 Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo Telp (0271) 2050410

FORMULIR PENGAJUAN PEMBIAYAAN

Nama	:
Tempat/tanggal lahir	:
Alamat	:
	:
No. Telp/HP	:
Pekerjaan	:
Status perkawinan	:
Nama istri/suami	:
Besar pembiayaan	:
Keperluan pembiayaan	:
Jaminan	:
Jangka Waktu Angsuran	:
Uang Muka (DP)	:

PENDAPATAN		PENGELUARAN	
Rutin	: Rp	Biaya Konsumsi	: Rp
Tambahan	: Rp	Sekolah/Anak	: Rp
Lain-lain	: Rp	Lain-lain	: Rp
Total Pendapatan	: Rp	Total Pengeluaran	: Rp

Catatan :

Anggota

(.....)

Manajer

(Rakhmat Setyawan A. Md)

Nb : Menyertakan Fotokopi Kartu Keluarga dan Fotokopi KTP suami isteri yang masih berlaku

1. Kartu Angsuran ini milik BMT ARAFAH

2. Bila kartu ini hilang atau rusak harap segera menghubungi Kantor BMT ARAFAH dan akan dikenakan biaya penggantian

3. Kartu Angsuran ini berlaku selama anggota mempunyai pembiayaan di BMT ARAFAH


4. Apabila menemukan Kartu Angsuran ini mohon menghubungi :

BMT ARAFAH
Jl. Lurik No. 17
Ngruki, Cemani, Sukoharjo
Telp. (0271) 2050410
Fax (0271) 726452

Manager
BMT Arafah

(Rahmat Setiawan, A.Md.)

KARTU ANGSURAN



KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH

BMT ARAFAH

Jujur, Amanah, Profesional
Badan Hukum : 18168/MHMDK.11/02/2007

Jenis Pembiayaan : _____

No. Rekening : _____

Nama : _____

Alamat : _____

Jl. Lurik No. 17
Ngruki Cemani Sukoharjo
Tlp. (0271) 2050410
Fax (0271) 726452

TEMAN TERBAIK SOLUSI KEUANGAN ANDA

Besar Pembiayaan : _____

Margin : _____

Total Pembiayaan : _____

Jangka Waktu : _____

Jumlah Angsuran : _____

Tanggal Realisasi : _____

Tanggal Jatuh Tempo : _____

No	Tanggal	Angsuran	Sisa Pembiayaan	Petugas
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				

JUMLAH

Anggota Pembiayaan
Petugas BMT Arafah

() ()

SLIP ANGSURAN	 BMT ARAFAH Jujur, Amanah, Profesional BH No. 14140/BH/KDK.11/IX/2007		SLIP No. : <input type="text"/>								
			Tanggal : <input type="text"/>								
			Angsuran Ke <input type="text"/>								
	No. Rekening	<input type="text"/>									
	Nama Debitur	<input type="text"/>									
	Alamat Debitur	<input type="text"/>									
	Jumlah Angsuran	Rp.	No. Telp. Penyetor								
	Terbilang	<input type="text"/>									
	Angsuran Untuk Pembiayaan : <input type="checkbox"/> Mudharabah <input type="checkbox"/> Musyarakah <input type="checkbox"/> Murabahah <input type="checkbox"/> Ijarah <input type="checkbox"/> Lainnya										
	<table border="1"> <tr> <td>Pokok :</td> <td>Margin/Bagi Hasil</td> <td>Petugas BMT</td> <td>Penyetor</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Keterangan Tambahan :</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Pokok :	Margin/Bagi Hasil	Petugas BMT	Penyetor	Keterangan Tambahan :				
Pokok :	Margin/Bagi Hasil	Petugas BMT	Penyetor								
Keterangan Tambahan :											

 BMT ARAFAH Jujur, Amanah, Profesional BH No. 14140/BH/KDK.11/IX/2007		No. : <input type="text"/>	
		Tanggal : <input type="text"/>	
Form Penangguhan Angsuran Pembiayaan			
No. Rek. Pembiayaan	:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nama	:	<input type="text"/>	
Alamat	:	<input type="text"/>	
No. HP / Telp.	:	<input type="text"/>	
Jenis Pembiayaan	:	<input type="text"/>	
Alasan Penangguhan	:	<input type="text"/>	
Batas Waktu Penangguhan	:	<input type="text"/>	
Kabag Lending (.....)		Anggota (.....)	

Lampiran 5

